

TESIS

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN
PURANGI KOTA PALOPO**

***UNDDERAGE MARRIAGE AT PURANGI VILLAGE IN PALOPO
CITY***

ILHAM LAMAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2017**

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN
PURANGI KOTA PALOPO**

Tesis

Sebagai salah satu Syarat untuk Mencapai Derajat

Magister

Program Studi

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Kekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan

Disusun dan Diajukan oleh

ILHAM LAMAN

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

2017

PRAKATA



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa penulis panjatkan sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat dan karunia Allah SWT, sehingga penyusunan dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan judul “Perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo”.

Proses penyelesaian tesis ini, merupakan suatu perjuangan yang panjang bagi penulis. Selama proses penelitian dan penyusunan tesis ini, tidak sedikit kendala yang penulis hadapi. Namun demikian, berkat bantuan dan bimbingan yang tulus dari berbagai pihak, semua masalah dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Heri Tahir, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Imam Suyino, M.Si., selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan, bimbingan, dan arahan yang tulus dan kemurahan hati membantu penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Manan Sailan, M.Hum., selaku penguji I dan kepada Bapak Prof. Dr. Darman Manda, M.Hum., selaku penguji II yang juga sebagai selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar yang banyak memberikan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor

Universitas Negeri Makassar, Bapak Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP., dan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Prof. Dr. Jasruddin, M.Si., dan para Asisten Direktur yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, baik pada saat mengikuti perkuliahan, maupun pada saat pelaksanaan penelitian dan penyusunan Laporan. Mudah-mudahan bantuan dan bimbingan yang diberikan mendapat pahala dari Allah SWT.

Terima kasih, penulis ucapkan kepada H. M. Judas Amir, SH., MH selaku Walikota Palopo atas izin yang telah diberikan untuk melaksanakan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kepada apatur Kelurahan dan semua tokoh masyarakat Purangi Kota Palopo yang telah banyak membantu dan memberi dukungan selama pelaksanaan penelitian. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS Kekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan angkatan 2015 serta rekan-rekan lain atau semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan moril dalam perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

Terwujudnya tesis ini juga atas doa, dorongan, dan restu keluarga. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga secara khusus disampaikan kepada kedua orang tua Laman, saudara-saudaraku serta keluarga yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dukungan, semangat serta doa yang tidak putus kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan hingga selesainya penulisan tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Makassar,

Mei 2017

Ilham Laman

PERNYATAAN KEORISINALAN TESIS

Saya, Ilham Laman,

Nomor Pokok : 15B02110,

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Perkawinan di bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo”. Merupakan karya asli. Seluruh ide yang ada dalam tesis ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri. Selain itu, tidak ada bagian tesis ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik.

Jika pernyataan diatas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

Tanda tangan

Tanggal.....

ABSTRAK

ILHAM LAMAN. 2017. *Perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo.* (dibimbing oleh Heri Tahir dan Imam Suyitno).

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur, akibat dari perkawinan di bawah umur, serta bentuk pencegahan perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu faktor ekonomi, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, teman dan lingkungan bergaul, serta faktor budaya malu (Siri'). (ii) adapun akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo antara lain, perceraian, menambah daftar putus sekolah, serta penelantaran anak. (iii) adapun bentuk pencegahan dari perkawinan di bawah umur, harus adanya kerja sama yang baik dengan pihak terkait tentang cara meningkatkan kualitas dan hasil dari perkebunan atau pertanian, sehingga masalah ekonomi bukan lagi menjadi alasan utama masyarakat untuk mengawinkan anaknya di bawah umur, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak serta mengadakan kerjasama dengan pihak pemerintah serta masyarakat terkait untuk memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan perkawinan serta memberikan pemahaman akan dampak dari perkawinan di bawah umur.

ABSTRACT

ILHAM LAMAN. 2017. *Underage marriage at Purangi village in Palopo City.* (Supervised by Heri Tahir and Imam Suyitno).

The study was conducted with the objective to examine the background, the impact, and ways in minimizing underage marriage at Purangi in Palopo City.

The type of study was qualitative with descriptive approach. Data were collected by employing Observation, Interview, and Documentation. Data were analyzed in descriptive qualitative by conducting data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study reveal that (i) There are factors as background of underage marriage, namely economy, law awareness on the importance of education, friends social environment, and ambarrased (Siri') culture; (ii) the impacts due to underage marriage at Purangi village in Palopo City among others are divorced, additional of drop-out school list, and children abandonmen;. (iii) The solution to minimize the impact of underage marriage are there should be mutual partnership to related parties on the ways to increase the quality and product of plantation or farms so the economical problem will not be the main reason of the people to arrange the marriage for their children, improve awareness on the importance of education for children, and build partnership with government and the people to provide comprehension on the meaning and objective of marriage as well as provide understanding on the impact of underage marriage.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-------------------------------|---------|
| PRAKATA | iv |
| PERTANYAAN KEORISINALAN TESIS | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |

| | | |
|---------|---|----|
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. | Hakikat Perkawinan | 10 |
| B. | Pengertian Perkawinan di bawah umur | 25 |
| C. | Aspek yang Memerlukan Kedewasaan dalam Berumah tangga | 39 |
| D. | Penelitian Yang Relevan | 41 |
| E. | Kerangka Konsep | 43 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 46 |
| A. | Jenis dan Lokasi Penelitian | 46 |
| B. | Fokus Penelitian | 47 |
| C. | Deskripsi Fokus Penelitian | 47 |
| D. | Sumber Data dan Informan | 48 |
| E. | Instummen Penelitian | 49 |
| F. | Teknik Pengumpulan Data | 50 |
| G. | Teknik Analisis Data | 51 |
| H. | Penecekan Keabsahan Data | 52 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 53 |
| A. | Deskripsi lokasi penelitian | 53 |
| B. | Hasil Penelitian | 60 |
| C. | Pembahasan | 85 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | |

| | |
|-----------------|-----|
| A. Kesimpulan | 96 |
| B. Saran | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | 101 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 104 |
| RIWAYAT HIDUP | 116 |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Halaman |
|---|---------|
| 1.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin | 55 |
| 1.2 Jumlah penduduk menurut mata pencarian | 56 |
| 1.3 Sarana pendidikan di kelurahan purangi | 58 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Halaman |
|-------------------------|---------|
| 2.1 Kerangka Konseptual | 45 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor | Halaman |
|------------------------------------|---------|
| 1. Dokumentasi penelitian | 104 |
| 2. Daftar Informan | 110 |
| 3. Pedoman Wawancara | 113 |
| 4. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 114 |
| 5. Kelengkapan Administrasi | 115 |
| 6. Riwayat Hidup | 117 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada manusia sebagai salah satu bentuk kecintaannya. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menjaga umat manusia dari hal-hal yang dapat mendekatkan kepada perbuatan yang dapat melanggar aturan yang ada. Sudah menjadi kodrat dari Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan dengan hal tersebutlah yang membawa manusia untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam sebuah ikatan Perkawinan. Ikatan perkawinan ini akan membawa manusia untuk selalu merasa tentram atau tenang dalam menjalani hidup yang telah sang pencipta berikan kepada setiap hambanya. Seperti yang Allah jelaskan dalam Alquran Surah Ar-ruum ayat 21 bahwa:

“Diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Sehingga engkau merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa Perkawinan merupakan salah satu cara tuhan menunjukkan rasa kasih sayang untuk menentramkan ummatnya, dan hal ini akan dipahami bagi mereka yang memahami dengan baik tentang esensi dari setiap perbuatannya. Sejalan dengan hal tersebut dijelaskan dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, dan merupakan ikatan psikologis.

Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara dua orang yang melangsungkan ikatan saja, akan tetapi ini juga adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi dan segenap keluarga yang membentuk hubungan kekerabatan. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Dalam sebuah perkawinan diperlukannya seseorang mengetahui syarat-syarat, prosedur, jenis, dan tujuan perkawinan itu sendiri. Disini penulis akan sedikit memaparkan tentang hal-hal diatas.

Tujuan perkawinan tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal, maka dibutuhkan kematangan dalam proses serta kelanjutan dari subjek atau orang yang akan melaksanakan janji perkawinan tersebut. Oleh karena itu salah satu kompetensinya yaitu dari faktor usia yang matang, seperti diketahui bahwa dalam aturan hukum di Indonesia umur yang belum matang dapat dikatakan sebagai status anak yang seharusnya, pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah penyumbang terbesar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan yang lebih baik, harus dipahami bahwa komunitas anak merupakan kekuatan terdepan yang tak terpisahkan dengan eksistensi dan masa depan suatu Negara (Madja El Muhtaj, 2009:235), olehnya

itu kewajiban kita bersama untuk memberikan perhatian penuh kepada setiap individu agar melaksanakan suatu perbuatan sesuai aturan agar generasi yang berkualitas dapat tercipta dengan baik kedepannya. Seperti halnya urusan kematangan urusan perkawinan di Indonesia telah diatur dengan baik tentang batasan usia setiap orang baik perempuan maupun laki-laki untuk melakukan perkawinan, akan tetapi di masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan masih banyak kita jumpai pernikahan yang tidak sesuai dengan umur matang yang diatur di negara kita.

Fenomena perkawinan di bawah umur masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Fenomena pernikahan usia muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, pernikahan usia muda dianggap lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang menentang pernikahan usia muda namun fenomena ini kembali lagi. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja sendiri, bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja di kota besar, yang ingin menikah muda.

Perkawinan di bawah umur hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan di bawah umur ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekadar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan

hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk lebih mengoptimalkan kehidupan yang baik yang selaras dengan aturan yang ada di negara Indonesia, agar terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat yang baik. Selain itu dalam syariat perkawinan dalam hukum islam bahwa diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan generasi yang akan datang. Tentunya hal ini pula yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dari seorang laki-laki ataupun perempuan untuk memilih perkawinan yang mapan, Sehingga keturunan yang dihasilkan adalah generasi yang dapat memberikan perkembangan hidup yang selaras baik untuk negara ataupun agama dan keluarga yang dibina sehingga tercipta keluarga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Oleh karena perkawinan haruslah menjadi pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk menikah agar tidak terjadi perkawinan yang tidak sesuai dari tujuan dasar perkawinan itu sendiri. Salah satu pertimbangan tersebut adalah kematangan usia.

Perkawinan di bawah umur sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga, Sehingga banyaknya perkawinan di

bawah umur ini juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Banyaknya kasus perceraian ini merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Namun dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan masalah ekonomi dan sebagainya, tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan diri dari segala aspek. Hal ini disebabkan oleh pengambilan keputusan menikah yang terlalu ringkas dan kurang pertimbangan demi efisiensi waktu sehingga bukan menyelesaikan masalah tetapi menumpuk masalah dengan masalah lainnya. Masalah demi masalah tersebut yang akan menambah daftar tentang banyaknya dampak- dampak negatif yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu.

Contoh kasus yang sering di lihat adalah kawin muda karena keterlanjuran hubungan seks akibatnya terpaksa dikawinkan karena telanjur hamil dan orangtua tidak memberi pilihan pada anak itu selain menikah dengan sang pacar padahal sebenarnya tidak ingin menikah, tetapi juga tidak ingin mengugurkan kandungan. Kasus-kasus seperti ini merupakan fenomena di kota-kota besar. Hal ini juga akan mengakibatkan penolakan dari keluarga karena malu. Selain itu, fenomena menikah di usia muda ini akan beruntut pada masalah sosial lainnya seperti tindak kriminal aborsi, risiko penyakit menular seks (PMS), serta perilaku a-sosial lainnya dan juga tidak menutup kemungkinan pekerja seksual juga muncul dari “budaya kebablasan” ini.

Contoh kasus lainnya seperti yang dikutip dari berita suara media tentang kasus pernikahan kontroversial yang dilakukan oleh Pujiono Cahyo Wicaksono

atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Puji berumur 43 tahun dengan Lutfiana Ulfa berumur 12 tahun. Meskipun pihak laki-laki mungkin dinilai sudah matang, namun bagaimana dampaknya bagi pihak perempuan yang masih anak-anak? Bila dikaji lebih dalam lagi, usia yang terlalu muda akan menimbulkan persoalan dari berbagai sisi seperti pendidikan, psikologi sosial, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain (Hanafi, 2011:1). Seperti yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2010 : 7) .

Persoalan perkawinan anak-anak (child bride) ini sebenarnya telah ditentang oleh organisasi perempuan di tanah air sejak 80 tahun yang lalu. Seorang perempuan dari organisasi Putri Indonesia pada tahun 1928 di Kongres Perempuan, menyatakan bahwa masalah perkawinan anak-anak merupakan penyebab kemunduran perempuan di tanah air dan perlu perhatian yang besar. Ia mengatakan bahwa hatinya sangat sedih bila melihat murid-murid perempuan yang baru berumur 11 atau 12 tahun dikeluarkan dari sekolah sebab hendak dinikahkan. Selain itu di Indonesia ini juga terdapat adat dari daerah setempat yang melegalkan perkawinan yang masih tidak mencupi usia produktif perkawinan, dan adapula yang terjadi karena pergaulan yang tidak terkontrol oleh masyarakat. Dan di daerah tertentu salah satu pemicu perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi dimana ketika sang anak telah lulus sekolah dasar ataupun menengah terkadang orang tua kesusahan untuk mendapatkan uang untuk

keperluan kelanjutan pendidikan anak, sehingga beberapa orang tua mengambil jalan pintas yang menurut mereka sebagai salah satu penyelesaian yaitu menikahkan anak tersebut agar kewajiban mereka terlepas dan mengalihkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pasangan dari anak tersebut(<http://fransiskalimantata.blogspot.co.id/2010/01/dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap.html>).

Demikian halnya yang terdapat di kelurahan Purangiterdapat 6 Rws seperti yang penulis amati dari tahun ketahun terjadi peningkatan angka perkawinan yang belum masuk dalam kategori usia yang matang untuk menikah sesuai aturan undang – undang yang berlaku di Negara indonesia. Seperti yang peneliti dapatkan dari hasil pengamatan serta hasil observasi awal dengan diskusi dengan imam pada kelurahan ini bahwa dalam setiap tahunnya ada saja warga yang masih melakukan hal ini dengan alasan yang beragam, sekitar 20 kasus perkawinan di bawah umur terjadi dalam rentan tahun 2015-2017 ini, dimana anak tersebut seharusnya menempuh pendidikan yang memadai, akan tetapi harus menjalani hal tersebut karena latar belakang kondisi mereka saat itu, olehnya itu timbul beberapa dampak yang langsung dapat di rasakan seperti halnya yang ada pada kasus-kasus yang sama pada daerah-daerah lain, seperti perceraian dan lain sebagainya. Berbagai dampak tersebut penulis berkeinginan untuk mengetahui penyebab serta dampak yang terjadi dari banyaknya pernikahan yang terjadi di usia yang seharusnya masih tergolong terlalu muda, dan apasajakah yang seharusnya remaja lakukan untuk menghindari adanya dampak buruk dari hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi penulis dengan judul Tesis : **Perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur ?
2. Apa akibat yang muncul dari perkawinan di bawah umur pasca terjadinya perkawinan ?
3. Bagaimanakah bentuk pencegahan terhadap akibat Perkawinan di bawah Umur?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Latar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui akibat dari perkawinan di bawah umur tersebut pasca Perkawinan.
3. Bentuk pencegahan dari akibat Perkawinan di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam

kasus perkawinan di bawah umur di kelurahan purangi kota palopo. Adapun manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih kongkrit bagi masyarakat serta keluarga untuk memberikan sumbangsi dan peranannya dalam menangani kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia serta dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam penanganannya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu terkait dampak yang akan timbul dengan maraknya kasus perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Perkawinan

Pengertian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kata perkawinan menurut istilah Hukum islam sama dengan kata "nikah". Nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah *pasangan* yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai *pernikahan*, Allah menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan (Idris Ahmad 1983:54). Selain itu, dalam kitab hukum perdata di jelaskan bahwa perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara hukum dan berlangsung untuk selama-lamanya.

Menurut Sudarsono (2005:6) sebelum adanya Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku hukum perkawinan bagi berbagai golongan suku bangsa di berbagai daerah. Hal ini diatur dalam penjelasan umum nomor 2 dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Penggolongan penduduk diatur dalam

Indische Staat Regeling yaitu peraturan ketatanegaraan Hindia pasal 163, dimana penduduk di bagi menjadi tiga golongan yaitu: golongan Eropa, golongan Pribumi, dan golongan Timur Asing. Adapun hukum yang berlaku sebelum adanya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan antara lain:

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang Indonesia asli yang Bergama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 No. 74).
4. Bagi orang-orang timur asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab Undang-undang hukum Perdata dengan sedikit perubahan
5. Bagi orang timur asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi warga Negara eropa dan warga Negara Indonesia keturunan eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-undang hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah hasil dari suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional yaitu yang berlaku bagi setiap warga Negara RI, ini merupakan hasil legislative yang pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan “ Bhineka Tunggal Ika” yang dicantumkan Dalam lambing Negara RI, selain sungguh mematuhi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 juga merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan yang maha Esa (Lily Rasyidi, 1982 : 24).

Dari peraturan inilah lahir pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut (Wirdjono Prodjodikoro, 1984:7).

Selanjutnya di bawah ini pendapat mengenai pengertian perkawinan ini beberapa pakar memberikan definisinya, seperti Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Sayuti Thalib, 1986 : 47). Artinya bahwa di dalam suatu perjanjian perkawinan terseimpan janji dan ikatan yang suci, kemudian perkawinan dikatakan suatu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya menyangkut pribadi kedua mempelai tapi juga urusan keluarga kedua belah pihak dan juga kehidupan bermasyarakat (Soemiyati, 1990 : 1). Definisi ini pula memberikan gambaran bahwa tidak hanya ikatan suci tapi didalam perkawinan terdapat hubungan penyatuan dua keluarga dari kedua mempelai. Menurut Imam Jauhari merupakan proses hubungan seksual manusia yang harus berjalan dengan kedamaian dengan menghormati hak-hak asasi manusia sebagai insan-insan sederajat antara pria dan wanita untuk memperoleh kehidupan yang baik didunia (Imam Jauhari, hal 1), sedangkan Menurut Subekti adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 1994:23). Hal ini berarti bahwa dalam sebuah perkawinan yang sah maka di bolehkan melakukan hubungan seks untuk kelangsungan hidup kedepannya.

Menurut Dr. Wirjono dalam buku hukum orang dan keluarga Soedharyo Soimin (2002:3), menyatakan bahwa perkawinan yaitu hidup bersama dari

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat –syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Menurut hukum islam seperti dalam surah Ar-Ruum ayat 21 bahwa di antara tanda –tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Sehingga engkau merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Sedangkan menurut Ahmad Ashar Bashir, Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Prof. Seholten merumuskan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang di akui oleh negara. Definisi yang hampir serupa pun di kemukan oleh Mahmud Yunus, Pengertian Pernikahan atau Perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Dalam hal ini, aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya. Serta Sulaiman Rasyid mengemukakan Pengertian Pernikahan atau Perkawinan, Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Sedang Abdullah Sidiq, Penikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang

perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Zahry Hamid mengatakan pendapatnya bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Pengertian Pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam. Kemudian Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari pengertian Perkawinan yang diungkapkan para pakar diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga. Akan tetapi dalam kitab Undang-undang hukum Perdata tidak terdapat pengertian perkawinan secara jelas. Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya memandang soal perkawinan hanya dari segi keperdataan. Demikian terdapat dalam pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : Undang-undang memandang soal perkawinan dalam hubungan-hubungan Perdata (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1976 : 26).

Arti dari pasal ini adalah suatu perkawinan agar menjadi sah dalam arti mempunyai akibat hukum haruslah diakui oleh undang-undang, hal ini terjadi apabila perkawinan dilangsungkan menurut undang-undang. Dengan kata lain perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang

ditetapkan kitab undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Hal ini jelas bertentangan Negara falsafah Negara pancasila yang berkaitan dengan masalah perkawinan yang merupakan perbuatan yang suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsure lahir/jasmani tapi juga unsure batin/rohani mempunyai peranan penting (hilma Adikusuma, 1990 : 7).

1. Syarat – Syarat Pernikahan

Syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat materil dan formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat mengenai pribadi calon mempelai, sedangkan syarat-syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan (Hilman Adikusuma, 1997 : 9).

Untuk jelasnya, maka akan penulis uraikan tentang syarat-syarat materil dan formil dalam perkawinan secara terperinci, yaitu :

a. Syarat Materil

Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok syarat materil adalah :

1) Harus ada persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat(1)).

Syarat ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dulu, yaitu seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia

dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk menanggulangi kawin paksa, Undang-Undang Perkawinan telah memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan menunjuk pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk itu dibawah ancaman yang melanggar hukum.

- 2) Usia calon mempelai pria harus mencapai umur 19 tahun dan wanita harussudah mencapai 16 tahun (pasal 7 ayat(1).

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dibenarkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam hal dimana salah seorang atau kedua orang tua meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh orang tua yang masih hidup atau wali/orang yang memelihara/datuk (kakek dan nenek) dari pihak yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan bersangkutan tidak menentukan lain.

- 3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-UndangPerkawinan.

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4. Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Pasal 4 menentukan :

- a) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka dia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempattinggalnya.
- b) Pengadilan yang dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin pada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila (Libertus Jehani, 2008 : 34) : (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaiistri, (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) Istri tidak dapat melahirkanketurunan.

Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan pendapat sebagai berikut: "Adanya Pasal 9 Undang-Undang Perkaw (1974 : 37)inan sesungguhnya merupakan akibat dari azas perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang ini, yaitu azas monogami. Azas ini dianggap pada masa sekarang sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat terutama dikalangan wanita bahwa dimadu itu dirasakan lebih banyak melahirkan penderitaan daripada kebahagiaan.". Walaupun demikian, pengecualian terhadap azas itu masih

dimungkinkan dengan persyaratan seperti yang terurai dalam Pasal 3, 4, dan 5 yang mengharuskan seseorang yang hendak mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memenuhi syarat-syarat (Libertus Jehadi 2008 : 35):

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selanjutnya ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) tersebut bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 20 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan (Libertus Jehadi 2008: 37).

Mengenai syarat-syarat persetujuan kedua calon mempelai dan syarat harus adanya izin kedua orang tua bagi mereka yang belum berusia 21 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b. Syarat Formil

Syarat-syarat formil yaitu syarat utama sesuai prosedur hukum, meliputi :

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada

Pegawai Pencatat Perkawinan.

- 2) Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- 4) Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya yang memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan calon istri/suami terdahulu bila seorang atau keduanya pernah kawin (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Perkawinan apabila telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu surat formil khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan dilaksanakan perkawinan (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan

yang maha esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 adalah sangat ideal karena dari tujuan perkawinan tersebut yang diperhatikan bukan segi lahirnya saja tetapi sekaligus juga ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang disesuaikan dengan ketuhanan yang maha esa. Selain itu diharapkan rumah tangga tersebut dapat berlangsung seumur hidup dan perceraian diharapkan tidak akan terjadi. Untuk itu suami perlu saling membantu, melengkapi dan mengisi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut UUP No 1 tahun 1974 adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan).

Menurut Soemiyati (2007: 12-17) tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan yaitu, kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Biar pun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna.

- 2) Memenuhi naluri tuntunan naluriah hidup kemanusiaan

Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda. Yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah keberanian atau seksual. Sifat keberanian yang biasanya didapati

pada diri manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah merupakan tabiat kemanusiaan.

3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dari kerusakan ialah adalah pengaruh hawa nafsu dan seksuil. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia baik laki-laki, maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal. Pengaruh hawa nafsu itu adalah sedmikian besarnya, sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah, termasuk lemah terhadap hawa nafsu.

4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Ikatan perkawinan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain yang biasanya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Sedangkan kita semua mengetahui bahwa pada umumnya antara laki-laki dan wanita sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperoleh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbale balik. Di atas dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia.

5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan. Karena segala keperluan masih ditanggung oleh orang tua. Tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggungjawab di dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si istri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktifitas kedua belah pihak, suami berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, sedang istri lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumahtangga yang damai dan bahagia. Di dalam ajaran Islam, suami adalah sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk membelai istri dan anak-anaknya.

Menurut Amir Syarifuddin (2006: 46-47) tujuan perkawinan adalah:

- a) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi mahluk hidup yang diciptakan Allah.
- b) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Menurut Mohammad Idris Ramulyo (1995: 26-27) tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman keluarga dan masyarakat. Untuk memperoleh

keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya.

Sedangkan secara umum tujuan perkawinan menurut Rafi'udin (2001:6) sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan keluarga muslim yang benar-benar bahagia, disamping menciptakan pendidikan sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Mendapatkan keturunan yang syah, memperoleh keturunan yang mengenal 2 (dua) orang tuanya secara jelas, serta orang tua yang bertanggung jawab kepada keturunannya.
- 3) Menghindari manusia dari lembah maksiat yang menghinakan, seperti perzinaan.
- 4) Menjaga keluarga dari pedihnya siksa neraka.
- 5) Memelihara pandangan mata, serta yang lainnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tujuan perkawinan dalam penelitian ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sehingga dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

1. Sakinah (tenang)

Salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah. Sakinah artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Dalam Tafsirnya Al-Alusi mengatakan bahwa sakinah adalah

merasa cenderung kepada pasangan. Kecenderungan ini merupakan satu hal yang wajar karena seseorang pasti akan merasa cenderung terhadap dirinya.

Apabila kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan Islam maka yang tercapai adalah ketenangan dan ketentraman, karena makna lain dari sakinah adalah ketenangan. Ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan. Karena pernikahan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan.

2. Mawadah dan Rahmah

Tujuan pernikahan yang selanjutnya adalah untuk memperoleh keluarga yang mawadah dan rahmah. Tujuan pernikahan Mawadah yaitu untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Tujuan pernikahan Rahmah yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Mengenai pengertian mawaddah menurut Imam Ibnu Katsir ialah al mahabbah (rasa cinta) sedangkan ar rahmah adalah ar-ra'fah (kasih sayang). Mawaddah adalah makna kinayah dari nikah yaitu jima' sebagai konsekuensi dilangsungkannya pernikahan. Sedangkan ar rahmah adalah makna kinayah dari keturunan yaitu terlahirnya keturunan dari hasil suatu pernikahan. Ada juga yang mengatakan bahwa mawaddah hanya berlaku bagi orang yang masih muda sedangkan untuk ar-rahmah bagi orang yang sudah tua.

Implementasi dari tujuan pernikahan mawaddah wa rahmah ini adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak

dan kewajiban masing-masing. Pernikahan adalah lambang dari kehormatan dan kemuliaan. Fungsi pernikahan diibaratkan seperti fungsi pakaian, karena salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Aurat sendiri bermakna sesuatu yang memalukan, karena memalukan maka wajib untuk ditutup. Dengan demikian seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu untuk mempersembahkan yang terbaik

B. Pengertian Perkawinan di bawah Umur

Pernikahan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Baik kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah. Di daerah perkotaan sebanyak 21,75% anak-anak dibawah usia 16 tahun sudah dinikahkan. Di perdesaan, angkanya jauh lebih besar yaitu 47,79 %, yang menampakkan kesederhanaan pola pikir masyarakatnya sehingga mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan. Setelah menikah seorang gadis di desa sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan hanya mengurus rumah tangganya, begitu pula suaminya diuntut lebih memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah.

Ada banyak pengertian perkawinan di bawah umur, diantaranya: (1) pengertian secara umum, merupakan institusi agung untuk mengikat dua spirit lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga, (2) menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, perkawinan di bawah umur adalah sebuah nama yang

lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi spiritual. Jadi, cukup logis kalau pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah), tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Oleh karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang (kematangan fisik, psikis, maupun spiritual).

Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata (Wahyono Darmabrata, 1974 : 19).

Pengaturan usia dewasa lazimnya disimpulkan atau dikaitkan dengan pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengenai pasal 47 UU Perkawinan, Prof.Hazairin,S.H, berpendapat bahwa pasal ini membingungkan. Pasal ini menentukan seseorang telah menjadi dewasa pada usia 18 tahun, tetapi sekaligus menentukan kembali menjadi tidak dewasa kalau anak tersebut belum menikah. Pasal 47 UU Perkawinan, tidak dapat dibaca seperti pasal 330 KUHPperdata, karena usia dewasa dalam KUHPperdata, ditentukan mereka yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Apabila perkawinan mereka putus sebelum berusia 21 (duapuluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali pada usia belum dewasa.

Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus.

Karena ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing.

1. Perkawinan Dibawah Umur Menurut konsep HukumPerdata

Pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPdata) (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2007 : 133-134).

Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2007 : 133-134).

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2007 : 133-134).

Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdata).

Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Dari uraian tersebut kita lihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-Undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat.

Hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata

dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa itu dicabut oleh hakim.

2. Perkawinan Dibawah Umur Menurut konsep Hukum Pidana

Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa dan dewasa. Yang disebut umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa. Yang berumur 17 tahun dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak, sedangkan belum cukup umur menurut pasal 294 dan 295 KUHP adalah ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali menjadi "belum cukup umur".

3. Perkawinan Dibawah Umur Menurut konsep Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula (Sudarsono, 2005 : 12).

Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri (Sudarsono, 2005 : 14).

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. Sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.

4. Perkawinan Dibawah Umur Menurut Konsep Undang-Undang R.Isekarang

Berdasarkan Undang-Undang R.I yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. UU perkawinan No.1 tahun 1974, hanya mengatur tentang :

- a. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat2).
- b. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat2).
- c. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat1).
- d. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).
- e. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang "yang disebut belum dewasa dan dewasa" dalam UU ini.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun

pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya, di dalam KHI disebutkan sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk *kemaslahatan keluarga dan rumah tangga* (Kompilasi hukum Islam 2005 : 10).

Kenyataan di lapangan menunjukkan, bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Di samping itu, ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia.

Dari sudut pandang kedokteran, perkawinan dibawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga.

Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan dibawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir perkawinan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan

terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur (Ibrahim, Vol 2 : 90)

Antara agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan dibawah umur. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan dibawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, perkawinan dibawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum *baligh*.

Terlepas dari semua itu, masalah perkawinan dibawah umur adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut.

Pendapat yang digawangi Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang perkawinan dibawah umur (pernikahan sebelum usia *baligh*). Menurutny, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokokpernikahan.

Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada.

Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.

Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan perkawinan di bawah umur. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al Thalaq: 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula perkawinan di bawah umur merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat.

Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan (Ibnu Hajar, Vol.9 : 237)

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah "Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/*kafaah*".

Hadis Nabi kedua berbunyi, "Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya".

Pada hakekatnya, perkawinan dibawah umur juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan nya sudah melampaui batas,

dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Perkawinan dibawah umur juga merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara' kenapa tidak ? ujar Imam Jalaludin Suyuthi.

Walaupun seperti yang disebutkan diatas, bahwa dalam satu sisi perkawinan dibawah umur ada positifnya namun kenyataannya perkawinan dibawah umur lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur'an dan hadits memang tidak ada menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa : Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Sama halnya dengan hukum adat. Hukum adat Indonesia, yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, adalah hukum kebiasaan tak tertulis yang tak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak untuk menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau

peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu.

Instrumen Hak Asasi Manusia, apakah yang bersifat internasional (international human rights law) ataupun yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia Perkawinan.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child 1990* yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Juga setiap negara peserta konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak dan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, Umur Minimum Menikah dan Pencatatan Pernikahan (*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*) 1964 menyebutkan bahwa negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan umur minimum untuk menikah dan bahwasanya pernikahan yang dilakukan di luar umur minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah.

Indonesia belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1964 tersebut, namun telah menetapkan usia minimum pernikahan melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alias sepuluh tahun setelah Konvensi tersebut lahir.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen HAM juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide pasal 3).

Namun demikian kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak memandang hal yang wajar jika pernikahan dilakukan pada usia anak-anak. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkannya berdasarkan hasil kajian dari laporan kasus-kasus KDRT, Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, diskursus dan penelitian yang dilakukan oleh PKPA tahun 2008, yaitu (Ahmad Sofian, <http://m.kompas>, magelang 2 Desember 2008);

- a. Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang yang dilihat dari perspektifekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak.
- b. Kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anaklaki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organreproduksi.

- c. Terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran.
- d. Korban perkawinan dibawah umur lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai istri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.
- e. Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa pernikahan di usia dini tidak dapat ditangani secara pidana.

Jika saja semua orang terutama orang tua benar-benar menyadari dan belajar dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkawinan anak dibawah umur tentu saja tidak ada orang tua yang ingin merelakan anak-anaknya terutama anak perempuannya akan menjadi korban berikutnya. Pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang diprogramkan oleh pemerintah dan juga usaha-usaha menolak perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perlindungan anak hanya yang akan menjadi wacana perdebatan tak berujung. Solusi lain harus dilakukan oleh negara yang melindungi anak dari praktik-praktik perkawinan dibawah umur adalah dengan merevisi UU No. 1 tahun 1974.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama-sama sejumlah organisasi gerakan perempuan pernah mengajukan revisi terhadap UU Perkawinan. Beberapa permasalahan pokok yang

diusulkan untuk direvisi antara lain :

- a. Pendewasaan usia perkawinan di atas 18 tahun, dengan tidak membedakan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki.
- b. Prinsip non diskriminasi dalam pencatatan perkawinan, di unit-unit di bawah naungan Departemen Agama.
- c. Prinsip non diskriminasi juga diterapkan terhadap hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki.
- d. Hak dan status anak yang dilahirkan di luar hubungan pernikahan tetap memiliki hak dan status yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan secara perdata, sesuai UU No.23 tahun 2002 pasal 7 ayat (1) menyebutkan Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Dukungan dan tuntutan tentang revisi Undang-Undang Perkawinan merupakan perwujudan dari upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, karena pada dasarnya anak hanya titipan dan karunia Tuhan. Prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak.

C. Aspek-Aspek yang Memerlukan Kedewasaan dalam Membangun Rumah Tangga

Dalam perkawinan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melaksanakan pernikahan.

Karena bila kita melihat fenomena yang ada, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan lebih dapat mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar.

Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan. Bila diklasifikasikan aspek-aspek yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai ukuran kualitas pribadi, menyebabkan batasan usia nikah tidak dapat dihindari. Setidaknya ada beberapa macam hal yang diharapkan dari pendewasaan usia, seperti:

1. Pendidikan dan keterampilan

Dalam bidang pendidikan dan keterampilan merupakan aspek yang sangat penting sebagai bekal kemampuan yang harus dimiliki bagi seseorang yang melangsungkan pernikahan. Hal ini sebagai penopang dan sumber memperoleh nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Dalam proses pendidikan yang ditempuh diharapkan seseorang dapat melihat ilmu pengetahuan sebagai bekal yang penting bila dibandingkan dengan potensi lainnya. Jika ia seorang pemuda, ilmu sangat diperlukan karena akan menempati posisi kepala rumah tangga yang akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Juga bagi seorang wanita, sekalipun bukan sebagai kepala rumah tangga tetapi akan sangat berpengaruh dalam pembentukan rumah tangga dan dalam mewarnai kepribadian anak. Seorang ibu yang baik dan berpendidikan akan mampu

mengarahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik dan cerdas serta berpribadi luhur dan berakhlak mulia. Karena itu peran seorang ibu amatlah besar dan tidak dapat diabaikan.

2. Psikis dan Biologis

Mentalitas yang mantap merupakan satu kekuatan besar dalam memperoleh keutuhan sebuah rumah tangga. Keseimbangan fisik dan psikis yang ada pada setiap individual manusia dapat menghasilkan ketahanan dan kejernihan akal dalam menyelesaikan berbagai jenis persoalan yang dihadapi. Akal yang potensial baru dapat muncul setelah mengalami berbagai proses dan perkembangan. Aspek biologis merupakan potensi yang sangat dominan terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu keberadaannya tidak boleh diabaikan begitu saja.

3. Sosial kultural

Pada sisi ini, seorang individu diharapkan mampu membaca kondisi dilingkungan sekitar dan dapat menyesuaikannya. Hal ini agar tercipta suasana dimana dalam suatu rumah tangga yang dibina diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar sebagai bagian dari anggota masyarakat sehingga keluarga yang dibentuk tidak merasa terisolasi dari pergaulan yang bersifat umum. Secara sosiologis kedewasaan merupakan sesuatu yang didasari atas perbedaan peran sosial yang ditempati. Artinya tingkat perkembangan kedewasaan berbeda-beda sesuai dengan tempat dan lingkungannya. Bagi pasangan dalam satu keluarga perlu memahami dan membekali akan pengetahuan ini, agar kelengkapan potensi yang diperkirakan dapat tercukupi.

D. Penelitian yang Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang relevan antara lain :

| NO | JUDUL PENELITIAN | HASIL |
|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan anak di bawah umur dan akibat hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo) | Dalam memberikan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sukoharjo berdasarkan pada berbagai fakta hukum yang didapat dari berbagai alat bukti, melalui pengumpulan berbagai alat bukti, hakim dapat mengetahui dengan jelas perihal permasalahan yang terjadi / duduk peristiwanya. Pertimbangan hakim mengabulkan perkawinan tersebut yaitu, hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua tentang prgaulan bebas |
| 2 | Persepsi masyarakat tentang perkawinan di bawah umur di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba | 1. Perkawinan di bawah umur adalah kebiasaan dan tidak mengetahui resiko serta angapan bahwa ini baik agar anak perempuannya tidak menjadi gadis tua. 2. Faktor yang mempengaruhi |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>adalah ekonomi</p> <p>3. Harusnya adanya upaya pemerintah dalam mensosialisasikan tentang dampak sesuai ketentuan yang berlaku berbagai alat bukti, melalui pengumpulan berbagai alat bukti, hakim dapat mengetahui dengan jelas perihal permasalahan yang terjadi/duduk peristiwanya. Pertimbangan hakim mengabulkan perkawinan tersebut yaitu, hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua tentang pergaulan bebas</p> |
| 3 | <p>Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini perspektif hukum islam</p> <p>(Studi kasus di Desa Bumirejo Wonosobo tahun 2009)</p> | <p>Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Bumirejo Wonosobo adalah karena karena adat, hasrat pribadi dan pendidikan.</p> <p>Ada beberapa kebaikan dalam pernikahan dini akan tetapi</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | karena tingginya resiko terhadap wanita yang hamil muda serta harmonisasi keluarga bagi yang masih terlalu muda sehingga pada desa Bumirejo melarang secara hukum islam terjadi hal tersebut. |
|--|--|---|

Dari beberapa judul penelitian sebelumnya memang memiliki keterkaitan dari segi masalah yaitu mencari tahu tentang masalah pernikahan di bawah umur dan sasarannya yang berbeda. Oleh karena itu peneliti memilih masalah tentang latar belakang dan akibat terjadinya perkawinan di bawah umur.

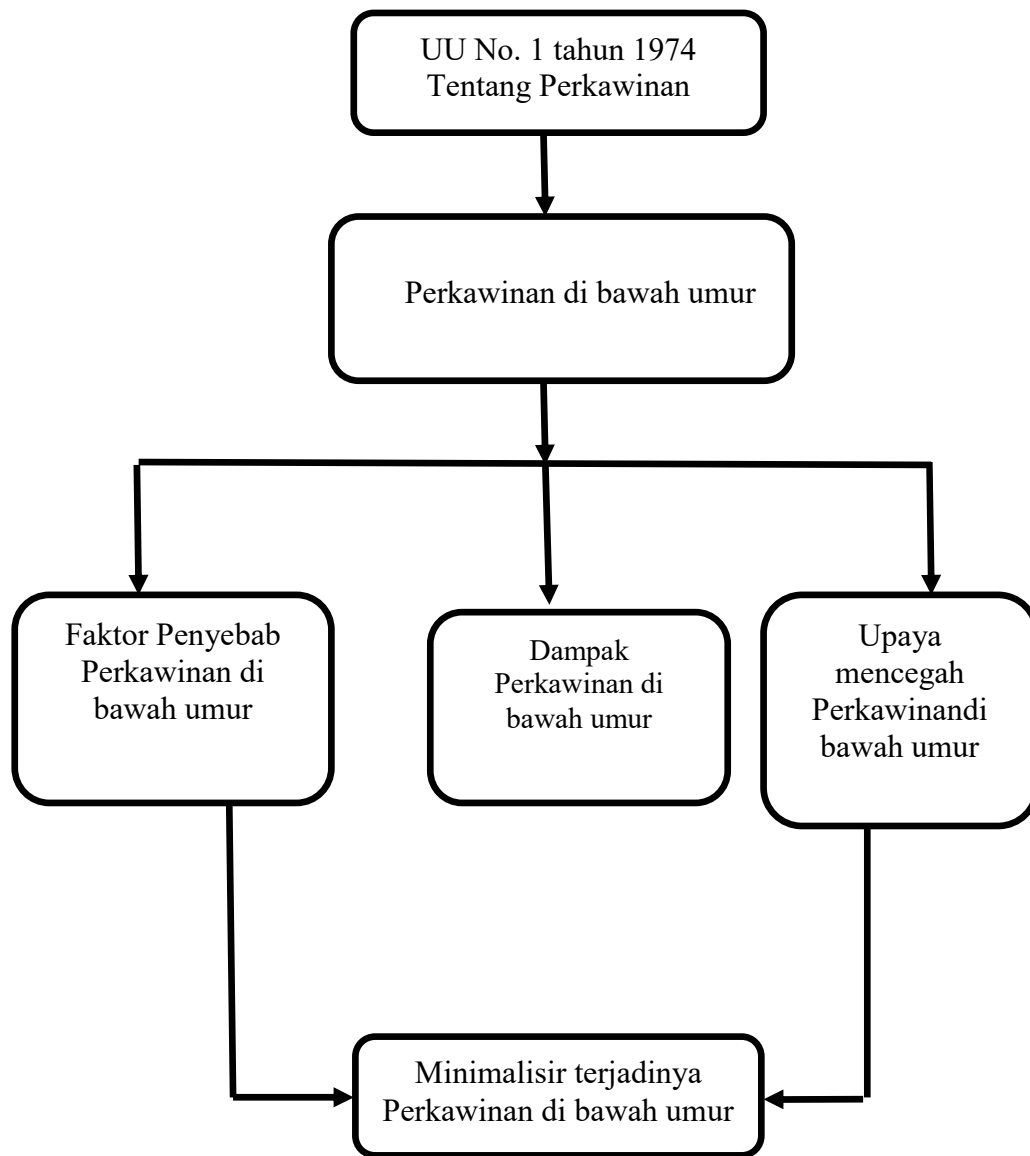
E. Kerangka Konsep

Seperti yang kita ketahui bahwa fenomena pernikahan di usia muda ini sudah di kenal sejak dahulu, di perkampungan biasa terdorong oleh adat dan faktor pemicu lainnya. Tidak hanya di pedesaan di perkotaan pun marak terjadi oleh karena pergaulan remaja yang tak terkontrol. Oleh karena itu para pelaku ini mengabaikan amanat undang- undang serta tujuan dari pernikahan itu sendiri. Dalam amanat undang- undang No. 1 tahun 1974 bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini harusnya

menjadi acuan dalam menjalani rumah tangga, bukan malah menjadikan pernikahan sekedar untuk menutup aib semata.

Pernikahan di bawah usia ini mulai di kenal di kalangan publik oleh Salah satu contoh kasus pernikahan di usia muda yang pernah terjadi pada tahun 2009 yang di lakukan oleh Pujiono Cahyo Widiyanto, seorang pengusaha kaya di wilayah Semarang, yang sering dipanggil dengan Syekh Puji. Dia menikahi atas persetujuan istri pertamanya Ummi Hanni dengan seorang gadis berusia 15 tahun bernama Lutviana Ulfa. Sontak kabar ini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, oleh karena remaja tersebut yang seharusnya masih harus duduk di bangku sekolah untuk mengecam pendidikan secara baik, malah harus di ppaksa untuk menikah. Selain dari dampak dari sisi pendidikan ada banyak dampak lain yang bisa di timbulkann dari pernikahan di usia muda tersebut seperti beberapa yang telah penulis jelaskan sebelumnya dalam kajian teori yang sumbernya telah peneliti rampungkan dari berbagai informasi yang penulis dapatkan. Seperti halnya di daerah lainnya di kelurahan purangi yang terdapat di kota Palopo sulawesi selatan pula penulis melihat gejala tersebut semakin bertambah dari waktu ke waktu sehingga dalam kajian pada tugas akhir ini sekira dapat menjadi sumbangsih kepada para pembaca untuk belajar dari dampak negatif dari adanya pernikahan di usia muda tersebut, sehingga dampak buruk tersebut dapat di hindari.

Dari banyaknya dampak tersebut, maka penulis akan akan menyajikan kerangka konsep yang terbangun dalam kasus dampak pernikahan di usia muda sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka konseppenangan Perkawinan di bawah umur

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi pada Pelaku Perkawinan di bawah umur. Secara mendalam, guna menghasilkan data deskriptif bersifat uraian kata-kata atau makna-makna tertulis dari orang-orang atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya serta memilih informan dari Pelaku Perkawinan di bawah Umur, serta di dukung dari informan tambahan dari warga atau pejabat terkait yang memiliki pengetahuan lebih tentang perkawinan di bawah umur.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo. Yang menjadi alasan pemilihan lokasi ini karena keingin tahuan peneliti tentang akibat atau dampak serta cara pencegahan terhadap dampak dari perkawinan di bawah umur di lokasi tersebut.

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian adalah latar belakang dan akibat adanya perkawinan di bawah umur yang belakangan ini mengalami angka yang cukup banyak, serta cara yang dapat di tempuh untuk mencegah dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya perkawinan di bawah umur.

C. Deskripsi Fokus Penelitian

Agar dicapai kesamaan persepsi dan pengertian mengenai fokus penelitian, berikut akan dikemukakan deskripsi fokus penelitian mengenai beberapa aspek :

- 1) Yang di maksud perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Perkawinan di bawah umur adalah sebuah bentuk ikatan/perkawinan yang mana pihak laki-laki atau pria berusia 19 (Sembilan belas) tahun ke bawah sedangkan pihak wanita berusia 16 (enam belas) tahun ke bawah. Jadi sebuah pernikahan disebut perkawinan di bawah umur atau di masyarakat di kenal dengan sebutan pernikahan dini

D. Sumber Data dan Informan

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari informan dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*) dan pengamatan (observasi), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengkajian bahan pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), dokumen-dokumen pada instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan

menggunakan teknik dokumentasi. Peter Mahmud marzuki (2010:141), mengemukakan jenis dan sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan primer dan bahan hukum sekunder. Sehubungan dengan hal itu menurut Said Sampara dan La Ode Husen (2013:44), sumber data data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara jelas sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Merupakan data yang di peroleh langsung dari obyek penelitian melalui observasi yakni mengamati secara langsung serta mencatat peristiwa penting berhubungan dengan pembahasan. Selanjutnya data yang diperoleh melalui wawancara tersebut sebagai data primer.

2. Data Sekunder

Data ini peroleh penulis melalui telaah dokumen yang ada kaaitanya dengan penelitian, data ini dapat melalui buku-buku hukum, baham kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu informan utama dan informan biasa. Penemuan informan utama dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* dan penemuan informan biasa dipilih secara *Snowball Sampling* (sugiyono, 2009:292). Penentuan informan biasa pada awal masih bersifat sementara dan akan berkembang kemudian setelah peneliti berada di lapangan. Sumber data pada tahap awal memasuki lapangan peneliti di pilih oorang-orang yang memiliki power dan otoritas pada objek yang diteliti, sehingga

mampu memberikan jalan kepada peneliti untuk mengumpulkan berbagai data yang di butuhkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dipilih sebagai informan utama berpatoakan terhadap pelaku perkawinan di bawah umur yang ada di kelurahan Purangi Kota Palopo, serta lembaga terkait yang berwenang, adapun yang menjadi informan biasa adalah warga masyarakat yang ada di Kelurahan Puranggi Kota Palopo..

E. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:222), penelitian kualitataif sebagai *Human Instrumen*, berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data serta melakukan pengumpulan data, melalui kualiatas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuan. Namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka dapat dikembangkan instrument penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

Oleh karena itu, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sebagai intrumen utama peneliti sudah melakukan observasi dengan mengamati secara langsung obyek peneliti, selanjutnya dilakukan wawancara dengan beberapa informan, sedangkan instrument lain berupa alat perekam untuk merekam saat peneliti mewawancarai informan, sedangkan kamera yang di gunakan untuk mengambil gambar-gambar sebagai dokumentasi saat melakukan penelitian, dan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang di

siapkan oleh peneliti, untuk mengungkap informasi yang terkait dengan penelitian sehingga data yang di kumpulkan bersifat valid/sahih.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian Kualitatif di rancang dan di susun oleh peneliti sendiri agar tersusun secara baik dan sistematis agar penelitian menghasilkan data yang valid/sahih. Mengacu pada urgensi pengkajian yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada wilayah yang merupakan lokasi penelitian, pada lokasi tersebut peneliti mengamati berbagai hal yang berhubungan dengan perkawina di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo sejak di keluarkan secara resmi surat izn penelitian yaitu pada tanggal 30 Januari sampai dengan 30 Maret 2017. Hal yang paling penting dalam proses observasi ini adalah mengamati pelaku perkawinan di bawah umur, agar di dapatkan data yang valid tentang latar belakang serta akibat yang akan timbul dengan adanya perkawinan di bawah umur serta bagaimana solusi yang bisa di tawarkan dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur tersebut agar tida berdampak negatif pada warga Kelurahan Purangi Kota palopo.
2. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pelaku perkawinan di bawah umur atau

key informan (informan kunci/Utama), serta kepada informan tambahan, seperti orangtua dan masyarakat sekitar termasuk tokoh masyarakat Kelurahan Purangi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data angung dari para pelaku perkawinan di bawah umur yang di dukung oleh beberapa informan tambahan yaitu orangtua serta tokoh masyarakat seperti imam kelurahan, imam masjid, ketua Rt, tokoh pendidik dan lainnya. Peroses wawancara ini peneliti laksanakan dari tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 4 Maret 2017. .

3. Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, suara, buku harian, dan dokumen-dokumen. Pada kesempatan ini peneliti menelusuri berbagai data yang ada pada imam kelurahan serta yang ada di kantor keluhan sendiri. Selain itu, proses dokumentasi ini juga sengaja peneliti adakan untuk memperkuat hasil penelitian ini, dengan meghadirkan gambar serta rekaman selama peneliti melaksanakan penelitian di Kelurahan Purangi kepada semua informan tentang latar belakang, akibat serta solusi terhadap perkawina di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, dimana seluruh data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Adapun tahapan-tahapan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Semua data yang diperoleh tentang perkawinan di bawah umur ini, dikumpulkan dan dicatat secara objektif kemudian diperiksa, diatur, dan diurutkan secara sistematis. Penulis mengumpulkan data baik dari observasi yang dilakukan dari tanggal 30 Januari 4 Maret, kemudian wawancara dengan beberapa informan tersebut di kumpulkan, serta di perkuat dengan adanya kumpulan dokumentasi dijadikan satu sehingga memudahkan peneliti dalam penyajian data tentang latar belakang, akibat serta solusi terhadap perkawinan di bawah umur tersebut.

2. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di pada lokasi penelitian yaitu di kelurahan Purangi, setelah peneliti mengumpulkan data, maka peneliti akan melakukan pemilihan data mana yang cocok dengan fokus penelitian yang akan diteliti melalui penyederhaan sehingga memudahkan peneliti dalam penyajian data seperti latar belakang perkawinan di bawah umur, akibat dari adanya perkawinan di bawah umur, serta bagaimana solusi terhadap perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo.

3. Penyajian data

Dilakukan dengan mendiskripsikan sekupulan informasi secara teratur dan sistematis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat. Setelah peneliti mereduksi data maka peneliti akan mendiskripsikan hasil penelitian baik dalam

observasi, wawancara maupun dokumentasi untuk memudahkan didalam penarikan kesimpulan pada hasil penelitian.

4. Verifikasi data dan kesimpulan

Upaya mendapatkan kepastian akan keabsahan dari data yang telah diperoleh, dengan memperhatikan kejelasan dari setiap sumber data yang ada. Dengan demikian maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan data dari keseluruhan proses yang telah dilaksanakan. Setelah peneliti menyajikan data dengan mendeskripsikan hasil dari penelitian maka peneliti akan menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang ditemukan dilapangan.

Oleh karena itu, sebelum data dianalisis terlebih dahulu diolah secara ringkas dan sistematis. Dalam hal ini Miles dan Huberman (Afrizal 2015 : 178) mengemukakan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.

H. Teknik Pengabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena sangat menentukan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan yakni :

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan apabila data yang ditemukan sebelumnya belum lengkap. Selain itu, perpanjangan pengamatan juga dapat dilakukan untuk mengecek kembali kebenaran data yang didapatkan sebelumnya.

2. Meningkatkan ketekunan

Teknik ketekunan pengamatan dilakukan dengan maksud mengadakan pengamatan dengan teliti, rinci dan mendalam serta berkesinambungan terhadap fenomena dan peristiwa yang terjadi pada latar penelitian sehingga ditemukan hal-hal yang relevan dengan kepentingan penelitian.

3. Triangulasi

Triangulasi pada tahap ini dilakukan triangulasi sumber yakni data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan sumber data primer, peneliti membuktikan kebenaran data tersebut dengan mewawancarai lagi orang trigulator sebagai pembanding. Data hasil wawancara dengan trigulator dibandingkan dengan hasil wawancara dengan sumber data primer. Apabila triangulator memberikan data yang sama terhadap setiap pertanyaan yang diajukan pada sumber data primer maka kesimpulan yang diambil peneliti semakin kuat. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi dan telaah dokumentasi dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh data yang valid.

4. *Member Check*

Pada tahap ini peneliti kembali kelapangan untuk mengecek kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan. Data yang sudah dianalisis di *cross-check* kembali kepada informan dengan memperhatikan data-data dan kesimpulan yang diambil oleh peneliti pada saat proses analisis data. Apabila data sudah dapat diterima dan disetujui maka dibuatlah kesimpulan hasil penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana Kota Palopo atau lebih di kenal dengan jalan Opu Tohalide. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui adalah kondisi geografis, demografis, dan keadaan sosial ekonomi.

a. Kondisi Geografis

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Jalan Opu Tohalide Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana Kota Palopo. Letak topografis tanahnya datar dan pegunungan, dengan luas wilayah sekitar 297,3 Ha, sebagian besar wilayah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, seperti perkebunan dan persawahan sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan petani penggarap.

Secara administrasi Purangi merupakan wilayah Kelurahan dengan status Perkotaan dengan jumlah RW (Rukun Warga) sebanyak 6 dan sejumlah 12 RT (Rukun Tetangga), Kelurahan Purangi merupakan Kota Kecamatan sehingga pelayanan tingkat kecamatan sangat mudah terjangkau, sedangkan jarak dari Ibukota sekitar 5 Km.

Kelurahan Purangi secara geografis terletak antara 3° 3'15.79"S lintang selatan dan 120°12'28.19"E bujur timur. Kelurahan Purangi yang berada pada bagian Kecamatan Wara Selatan dengan batas wilayah :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Sendana
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sampoddo
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec Bua Kabupaten Luwu
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sendana

b. Kondisi Demografi Daerah Penelitian

1. Jumlah Penduduk

Kelurahan Purangi yang luas keseluruhannya 297,3 Ha, terbagi RW (Rukun Warga) sebanyak 6 dan sejumlah 12 RT (Rukun Tetangga). Kelurahan tersebut dihuni oleh sekitar 1.885 Jiwa yang terdiri dari 973 Jiwa laki-laki dan 912 Jiwa perempuan. Berdasarkan jumlah tersebut jumlah jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jumlah jenis kelamin Perempuan. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|-----------|----------------------|---------------|
| 1. | Laki-Laki | 973 jiwa |
| 2. | Perempuan | 912 jiwa |
| Jumlah | | 1.885 jiwa |

Sumber : Profil Kelurahan Purangi, 2016-2017

c. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kelurahan Purangi

Kelurahan Purangi yang merupakan bagian dari Kota Palopo, yang memiliki luas 297,3 Ha dengan 1.885 jiwa ini, memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang beragam, sebagai berikut :

1. Tingkat Perekonomian

Luas wilayah Kelurahan Purangi Kota Palopo yang memiliki luas 297,3Ha dengan kondisi sebagian besar wilayahnya adalah wilayah perkebunan ini, menuntut warga yang berjumlah 1.885 jiwa harus menjalani hidup sebagai petani. Dalam kesehariannya petani dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang seadanya, menyebabkan para petani memiliki penghasilan yang beragam pula. Dengan pengetahuan bertani yang seadanya inilah yang menyebabkan tingkat perekonomian di wilayah ini tergolong masih kurang dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jika hal ini dirumuskan dalam penggolongan tahapan keluarga, maka Kelurahan Purangi sebagian penduduknya termasuk keluarga pra sejahtera dan secara umum tergolong dalam keluarga sejahtera I, hal ini dapat dilihat dari kondisi sehari-hari mereka yang terkadang belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan baik. Bahkan hal ini terkadang yang memiliki dampak bagi sebagian warganya dalam memilih jalan keluar untuk keluar dari masalah ekonomi tersebut, meskipun Kelurahan Purangi yang merupakan wilayah Kota, alasan ekonomi tidak jarang pula menyeret remaja untuk memilih jalan singkat dari pada harus menempuh pendidikan. Alasan ini menyebabkan masih banyak penduduk yang tidak menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya tamat SD (Sekolah Dasar) dengan harapan setelah tamat sekolah dapat membantu orang tuanya, bahkan ada beberapa yang tidak tamat SD (Sekolah Dasar). Hal ini karena menurut mereka mencari pekerjaan seadanya yang penting bisa makan itu

sudah cukup, bahkan ada beberapa orang tua membebaskan pekerjaan yang masih tidak sesuai dengan umur mereka, seperti menjadi buruh bangunan, toko, ikut berkebut dengan beban kerja yang berat serta ada pula yang memberhentikan anaknya dengan alasan membantu di rumah saja dan orangtuanya yang mencari nafkah, baik sebagai petani maupun pedagang di pasar sentral Palopo.

2. Mata Pencaharian

Kelurahan Purangi yang dihuni oleh 1.885 jiwa secara keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah petani. Berikut ini merupakan tabel mengenai jumlah penduduk Kelurahan Purangi menurut mata pencaharian.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|--------|---------------------|-------------|
| 1. | Petani | 1.025Orang |
| 2. | Pedagang | 26 Orang |
| 3. | PNS | 8 Orang |
| 4. | Buruh | 4 Orang |
| 5. | Peternak | 4 Orang |
| 6. | Nelayan / Perikanan | - |
| 7. | Industri Kecil | - |
| 8. | Pelayaran | 10 Orang |
| 9. | Lain-Lain | 808 Orang |
| Jumlah | | 1.885 orang |

Sumber : Monografi Kelurahan Purangi, 2016-2017

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar mata pencaharian Kelurahan Purangi adalah petani. Adapun yang lain bermata

pencabarian sebagai PNS, pedagang, peternak, dan buruh, merupakan pekerjaan yang digeluti hanya sebagian kecil dari penduduk saja.

3. Sarana Transportasi dan Komunikasi

Sarana transportasi di Kelurahan Purangi cukup beragam kendaraan umum, mobil pribadi, motor dan sepeda, adapun yang dominan di gunakan adalah sepeda motor, hampir dari setiap penduduk pada kelurahan Purangi ini memiliki sepeda motor. Sarana komunikasi dan informasi yang ada di Kelurahan Purangi sudah cukup baik, seperti tersedianya telepon genggam, televisi, radio, dan informasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi dalam bentuk berita seluruh dunia. Dengan ketersediaan alat komunikasi dan media tersebut setiap warga dengan mudah untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu dengan lainnya.

4. Sarana Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah menyediakan sarana pendidikan bagi penduduk di Kelurahan Purangi. Berikut rinciannya:

Tabel 3. Sarana Pendidikan di Kelurahan Purangi

| No | Tingkat Gedung | Gedung | Guru | Murid |
|--------|----------------|--------|------|-------|
| 1 | TK/TPA | 1 | 3 | 30 |
| 1. | SD/MI | 8 | 26 | 227 |
| 2. | MTs | 1 | 16 | 54 |
| Jumlah | | 10 | 45 | 311 |

Sumber : Observasi , 2016-2017

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Purangi sekolah tingkat Tk dan TPA terdapat 1 gedung dengan jumlah siswa sebanyak 30 Siswa/siswi, Sekolah Dasar (SD) terdapat 8gedung, dan tenaga pengajar ada 26 orang yang terdiri dari 227 siswa/siswi, sedangkan MTs memiliki 1 gedung dengan 3 pendidik dan 54 siswa/siswi.

5. Agama

Indonesia adalah negara yang membebaskan warga Negeranya memilih kepercayaannya masing-masing. Hal ini lah menjadi panutan warga di Kelurahan Purangi yang mayoritas beragama Islam memberikan ruang kepada warga yang memiliki kepercayaan selain Islam, untuk menempati wilayah tertentu pada kelurahan tersebut, sebanyak 19 jiwa laki-laki dan 24 jiwa perempuan yang Beragama Protestan dan 31 orang laki-laki serta 23 orang perempuan yang Bergama Khatolik. (Sumber: Monografi Kelurahan Purangi tahun 2016-2017). Dalam kesehariannya, mereka saling memberi ruang pada masing-masing agama untuk melaksanakan kesehariannya menurut tatanan keyakinan mereka, bahkan masalah perkawinan pun di laksanakan dengan tata cara ke agama masing-masing.

6. Perumahan dan Tempat Ibadah

Kelurahan Purangi, walaupun sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, tetapi sebagian warga pada RW tertentu memiliki hunian yang baik, di samping beberapa wilayah yang kondisi rumahnya masih tergolong belum sempurna. Banyak orang yang bekerja dengan tujuan untuk bisa memperindah rumahnya. Itulah salah satu alasan orang tua tidak dapat menyekolahkan anaknya. Anak-anaknya dari kecil sudah biasa disuruh untuk

mencari uang untuk menambah biaya kehidupan keluarganya, untuk bisa memperindah rumahnya. Dengan demikian rumah-rumah penduduk di Kelurahan Purangi pada umumnya sudah permanen dan sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan, karena rumah tersebut telah memiliki ventilasi, hanya sebagian kecil saja di Kelurahan Purangi yang semi permanen.

Di Kelurahan Purangi terdapat beberapa masjid dan mushola. Jumlah masjid di Kelurahan Purangi ada 3 sedangkan mushola ada 1 mushola. Sebagian besar penduduk Kelurahan Purangi menjalankan ibadahnya di masjid dan di Mushola namun ada juga yang melaksanakan ibadahnya di rumahnya masing-masing.

7. Kesehatan Masyarakat

Untuk menjaga kesehatan masyarakat Kelurahan Purangi memiliki Bidan dan Perawat Puskesmas dengan di bantu oleh masyarakat yang termasuk dalam kelompok masyarakat Kader Kesehatan, di Kelurahan Purangi terdapat 1 Puskesmas umum dan 1 Puskesmas serta beberapa Pustu bantu. Untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan, bidan desa dan aparat pemerintah desa sering memberikan pengetahuan tentang pentingnya kesehatan bagi manusia dan bagaimana cara menjaga kesehatan.

Di Kelurahan Purangi dalam hal kesehatan masyarakat bersama-sama dengan aparat Kesehatan semaksimal mungkin untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai dan sehat dari berbagai macam penyakit. Masyarakat di Kelurahan Purangi sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Bagi mereka yang bekerja sebagai petani tidak jarang dari

pekerjaan yang mereka geluti memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan mereka. Sebagian besar dari penduduk yang ada di Kelurahan Purangi tidak semua menyadari akan pentingnya kesehatan bagi mereka sendiri.

Sebagian besar masyarakat di sana apabila memeriksakan kesehatannya tidak langsung berobat ke rumah sakit, tetapi pertolongan pertama yang mereka lakukan cukup dengan membeli obat di warung-warung terdekat kemudian bila sakitnya tidak kunjung sembuh baru dibawa ke puskesmas. Mereka bukannya tidak mau diperiksa di rumah sakit namun dikarenakan biaya yang sangat terbatas. Tidak jarang dari mereka apabila sakit mereka tidak segan-segan meminta bantuan kepada dukun terlatih. Kemudian untuk pelaksanaan posyandu bidan dan aparatur pemerintahan serta masyarakat Kader Kesehatan bekerjasama untuk bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut secara rutin. Untuk pelaksanaannya, posyandu dilaksanakan tidak hanya dalam satu RW, namun ada di beberapa RW yang memiliki gedung PUSTU, dalam sebulan posyandu hanya diselenggarakan satu kali.

B. Hasil Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak terungkap melalui wawancara dilengkapi dengan data hasil observasi langsung yang dilakukan dalam rentang waktu dari akhir Januari sampai dengan Maret. Untuk memperkuat substansi data hasil wawancara, dan observasi, maka dilakukanlah penelusuran terhadap

dukumen dan arsip yang ada. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan pada fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo.

Berdasarkan dari hasil penelitian, ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di kelurahan Purangi Kota Palopo.

Seperti yang telah di jelaskan pada gambaran umum lokasi penelitian bahwa, warga pada kelurahan Purangi ini bergantung pada hasil dari pertanian mereka, oleh karena wilayah mereka sebagian besarnya adalah wilayah perkebunan. Dengan kemampuan dan pengetahuan yang seadanya tersebut memicu hasil pertanian yang terkadang tidak dapat mencukupi kebutuha sehari-harinya, Faktor ini merupakan salah satu yang melatar bekangi terjadinya perkawinan di bawah umur. Alasan ekonomi atau kebutuhan ekonomi yang merupakan salah satu yang paling di rasakan sangat mendesak dalam keluarga. Beberapa orantua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan salah satu solusi untuk mengurangi beban orangtua dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta dapat memberikan tambahan sumbangan bahan pokok dari pendamping anaknya.

Melalui hasil observasi yang peneliti laksanakan di Kelurahan Purangi, bahwa dengan latar belakang keluarga ekonomi dengan penghasilan yang tidak menentu inilah, dapat memicu mengawinkan anaknya di bawah umur yang merupakan salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Suci yang memberikan penuturan bahwa”

Saat saya menemukan pasangan yang saya rasa cocok, orangtua saya langsung menyetujui jika saya menikah, karena bagi keluarga yang penting cocok dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan sehari-hari, karena jika pasangan saya telah mampu untuk memenuhi kebutuhan saya, maka saya pun mengambil keputusan itu. Cara ini juga dapat membantu kebutuhan sehari-hari orangtua saya, karena saya yang masih tinggal bersama orangtua . (Wawancara, Tanggal 11 Februari 2017).

Hal ini di benarkan oleh ibu dari Suci, Ibu Bunga yang memberikan pernyataannya bahwa :

Pekerjaan saya yang hanya sebagai buruh rumput laut dengan anak yang banyak menuntut saya untuk kerja keras agar kebutuhan sehari-hari anggota keluarga terpenuhi, sehingga apabila ada yang sudah siap melamar Suci dan memiliki pekerjaan baiknya diterima saja. Dengan perkawinan tersebut juga bisa meringankan beban saya bahkan bisa menambah kebutuhan sehari-hari dari hasil suami Suci bekerja.”(Wawancara, Tanggal 11 Februari 2017).

Alasan ekonomi ini pula menjadi alasan oleh orangtua dari Riswandi. Pak Nawir yang mengatakan bahwa :

Penghasilan saya hanya Pas-pasan, jadi kalau si anak sudah merasa telah mampu untuk hidup sendiri dan telah memiliki pasangan yang cocok baiknya di kawinkan saja, untuk mempermudah karena belum cukup umur jadi nikah biasa saja dulu. Dengan begini beban ekonomi keluarga dapat berkurang serta dapat membantu untuk biaya saudaranya yang lainnya (Wawancara, Tanggal 10 Februari 2017).

Pernyataan dari ayah Riswandi tersebut memberikan gambaran bahwa dengan alasan ekonomi orangtua dengan mudahnya memberikan persetujuan untuk mengawinkan anaknya meskipun harus dengan cara Siri untuk menghindari pengurusan administrasi nikah, karena umur yang masih tergolong sangat muda. Bahkan dengan alasan mengawinkan anaknya, orangtua merasa akan mendapat

keringanan dan tambahan kebutuhan dari pendamping anaknya yang harus tinggal serumah dengan orangtuanya, karena belum mempunya untuk hidup mandiri.

Selanjutnya, alasan ekonomi yang menjadi salah satu faktor ini pun turut di rasakan oeh salah satu orangtua yang menjodohkan anaknya pada saat menempuh pendidikan di salah salah satu madrasah Tsanwiyah, yaitu orangtua dari Wisna, Imran mengatakan bahwa:

Kalau sudah ada jodoh yang cocok dan mampu untuk hidup berumah tangga, baiknya dikawinakan saja. Cara ini bisa menjadi solusi karena mau disekolahkan juga biaya tidak mencukupi, dengan demikian saudara yang lain yang belum mampu berumah tangga dan belum menemukan pasangannya akan terbantu. Saya kira umur tidak menjadi masalah bagi mereka, itu merupakan persoalan administrasi saja, olehnya itu saya yang langsung mengajukan permohonan ke pengadilan. (Wawancara, Tanggal 14 Februari 2017).

Begitu pula yang di tuturkan oleh kakak tertua yang mengambil peran sebagai orangtua Dedi setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, Pak Kancong yang mengatakan bahwa”

Umur bukanlah penentu orang untuk menikah karena kebutuhan sehari yang harus dipenuhi seperti sandang pangan juga sangat penting untuk di pertimbangkan, jadi kalau sudah memilih untuk menikah jadi dia siap untuk bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, sehingga beban orangtua berkurang . (Wawancara, Tanggal 18 Februari 2017).

Hal ini turut di benarkan oleh Dedi, yang mengatakan bahwa:

Bagi keluarga saya, yang pasti siap memikul tanggung jawab terutama mengenai kebutuhan sehari-hari, umur bukanlah kendala . (Wawancara, Tanggal 18 Februari 2017).

Selanjutnya alasan ekonomi pun di tuturkan oleh ibu dari fitri, Ibu Busu yang mengatakan bahwa”

Anak saya dari dari hasil perkawinan pertama dan kedua kan banyak, semuanya tinggal bersama saya yang pekerjaannya utama berdagang sayur di pasar, jadi kalau anak saya ada yang suka buat apa menunggu

lama itukan bisa mengurangi beban yang harus saya tanggung. (Wawancara, Tanggal 19 Februari 2017).

Dari beberapa pernyataan orangtua di atas dapat memberikan gambaran bahwa, alasan ekonomi menjadi faktor pendorong beberapa orangtua untuk menyetujui perkawinan anaknya atau dengan alasan ini orangtua berkesimpulan untuk menikahkan anaknya yang mereka rasa telah mampu untuk dikawinkan. Hal ini turut dibenarkan oleh beberapa pelaku perkawinan di bawah umur yang merasa bahwa perkawinan ini merupakan solusi terbaik untuk masa depan mereka kelak.

Seperti pernyataan dari salah satu informan saya temui di rumahnya bersamaan dengan orangtua dan istrinya, Riswandi yang mengatakan bahwa”

Mungkin persetujuan menikah adalah jalan yang baik, karena sebenarnya saya ingin tetap bersekolah tapi orangtua saya tidak mampu mencukupi kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari saya. (Wawancara, Tanggal 10 Februari 2017).

Begitu pula yang di tuturkan oleh istri Riswandi yang juga merupakan informan penelitian ini, Lalla Risma yang mengatakan bahwa”

Saya ikut menyetujui keputusan Riswandi dan keluarga untuk menikahkan kami, meskipun karena kendala umur sehingga kami hanya menikah Siri, akan tetapi setidaknya ada yang bisa memberikan saya nafkah. (Wawancara, Tanggal 10 Februari 2017).

Pernyataan tersebut membenarkan apa yang telah di sampaikan oleh ayah dari informan, seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya. Selain itu beberapa informan atau pelaku perkawinan di bawah umur ini juga merasakan akibat awal dari terjadinya perkawinan karena alasan ekonomi, meskipun ini bukanlah satu hal mendasar dari terjadinya hal tersebut.

Seperti yang informan tuturka kepada peneliti pada saat proses wawancara, Eci Suki mengatakan bahwa”

Alasan ekonomi memang benar merupakan salah satu pemicu saya menikah, meskipun saya masih daam bangku sekolah, karena selama ini saya hanya tinggal dengan saudara dan bapak yang berpenghasilan tidak menentu. (Wawancara, Tanggal 26 Februari 2017).

Hal ini juga di tambahkan oleh kakak dari Eci Suki, Devi Suki yang mengatakan bahwa”

Masalah kebutuhan sehari-hari memang salah satu alasan dari kami menikah pada saat menemukan pasangan karena kan bisa ada yang membiayai kebutuhan kami. Seperti yang anda ketahui bahwa bapak saya setelah ibu saya meninggal tidak ada pekerjaan tetapnya dan lebih banyak nongkrong bersama temannya terkadang tidak pulang . (Wawancara, Tanggal 26 Februari 2017).

Beberapa informasi di atas, memberikan gambaran bahwa kebutuhan ekonomi merupakan alasan yang banyak menjadi alasan beberapa pelaku perkawinan di bawah umur dan keluarga menikahkan atau memberikan persejuaan di adakannnya perkawinan.

Hal ini di benarkan oleh Tamrin yang merupakan Imam Kelurahan Purangi, menyatakan bahwa :

Saya selalu mengajukan beberapa pertanyaan sebelum membantu pengurusan perkawinan bagi setiap pendaftar yang ingin menikah pada umur yag masih tergolong di bawah umur, akan tetapi alasan ekonomi merupakan salah satu persoalan yang dominan di ungkap baik oleh kedua orangtua maupun sang calon pengantin. (Wawancara, 12 Februari 2017).

Ungkapan dari Imam Kelurahan Purangi tersebut memberikan pengutan tentang salah satu faktor yang melatar belakanginya terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di kelurahan Purangi Kota Palopo. Faktor ekonomi menjadi

jalan yang di tempuh oleh beberapa orangtua dan pelaku untuk mencari sosulusi masa depannya, meskipun hal tersebut belum tentu dapat menyelesaikan masalah. Solusi yang mereka jadikan jalan tersebut bisa jadi mendatangkan akibat baru dalam kehipun selanjutnya.

Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa, faktor pertama yang banyak meletarbelakagi para remaja di kelurahan Purangi melakukan perkawinan di bawah umur karena masalah ekonomi.

Selain itu, ada salah satu faktor lain yang sangat berkaitan erat pula dengan masalah ekonomi, yaitu tentang rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Bahkan banyak di antara mereka tidak menyadari bahwa perkawinan pula memerlukan pengetahuan yang baik tentang tujuan serta apa saja yang menjadi arti dalam perkawinan. Pendidikan memberikan perubahan pola pikir kepada setiap orang yang dapat memahami setiap esensi pendidikan, ada beberapa Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia karena rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak, ini menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan pada umur yang belum matang. Beberapa orang tua beranggapan bahwa pendidikan itu tidak dapat memberikan kontribusi yang baik kedepan kepada para peserta didik, sehingga mereka lebih memilih untuk memberhentikan anaknya bersekolah lalu di Kawinkan.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada Kelurahan Purangi Kota Palopo, bahwa banyak diantara peserta didik yang harus putus sekolah dengan alasan akan menikah.

Seperti yang di sampaikan oleh kepala Madrasah ibtida'iyah (MI) DDI 3

Purangi, Marno P, . Pada saat wawancara yang mengatakan bahwa:

“Murid sekolah kami ada yang harus berhenti atau putus sekolah karena persoalan perkawinan, salah satu murid yang duduk di kelas 5 menjelang naik kelas 6 harus berhenti sekolah karena persoalan persetujuan menikah oleh orangtunya, bahkan pada umur yang sangat muda dan dengan pengetahuan yang minim tentang perkawinan.”(Wawancara, Tanggal 1 Februari 2017).

Hal ini dibenarkan oleh Eviyanti informan yang merupakan salah satu murid MI DDI 3 Purangi. yang mengatakan bahwa:

“Saya memang murid dari MI DDI 3 Purangi, saya berhenti sekolah pada kelas 5 menjelang kelas 6, karena orangtua saya langsung meminta untuk menikah dengan kenalan saya, dan saya hanya meneruti persetujuan tersebut meskipun saya tidak mengerti secara baik tentang apa itu perkawinan.”(Wawancara, Tanggal 1 Februari 2017)

Anak pada umur Sekolah Dasar seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan untuk kelayakan hidup dan perkembangan yang lebih baik untuk mendapatkan harkat dan martabatnya sesuai amanat Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu di butuhkan pendidikan yang lebih baik. Esensi pendidikan pada anak akan melahirkan manusia yang memiliki pandangan masa depan lebih, akan tetapi jika harus di kawinkan dini kiranya hal tersebut akan merusak masa perkembangan yang seharusnya mereka dapatkan dalam usia mereka, seperti masa kanak-kanak, remaja dan perkembangan masa lainnya, oleh karena harus merubah status anak-anak menjadi seorang ibu rumah tangga. Hal yang sama tidak hanya di rasakan oleh peserta didik yang berusia sekolah Dasar (SD) akan tetapi pada anak pada jenjang pendidikan di atas sekolah dasar.

Seperti hasil wawancara dengan sekolah MTs DDI 3 Purangi , Nurdin, juga mengatakan bahwa:

“Beberapa siswa yang seharusnya melanjutkan pendidikan dengan baik, akan tetapi harus berhenti bersekolah karena persoalan perkawinan, entah itu karena keputusan sendiri ataupun karena faktor orangtua yang tidak menyadari akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anaknya beberapa orangtua malah menganggap bahwa persoalan pendidikan bukanlah hal yang penting yang paling mendasar adalah cepat ada yang bisa memenuhi kebutuhannya”. (Wawancara, Tanggal 2 Februari 2017)

Hal dibenarkan oleh orangtua Wisna, Pak Imran yang mengatakan bahwa”

“Selfi merupakan salah satu murid dari MTs DDI 3 Purangi yang tidak lanjut sekolah karena saya mohonkan untuk di kawinkan dengan salah seorang anak dari kenalan saya, intinya di sini kalau sudah ada kesepakatan oleh kedua orangtua baiknya di kawinkan saja, bersekolah sampai tamat pun juga ujungnya akan menikah juga. Dan mumpung ada yang cocok dan bisa menjamin masa depannya, jalan terbaik adalah bermohon saja ke pengadilan agama karena katanya umurnya yang masih 13 tahun masih di bilag di bawah umur. Dengan demikian kebutuhannya bisa terpenuhi dari pada harus sekolah yang harus memikirkan biaya sekolah yang tidak sedikit” (Wawancara, Tanggal 14 Februari 2017).

Hal yang sama di benarkan oleh Wisna salah satu siswa pada MTs DDI 3 Purangi serta merupakan salah satu pelaku perkawinan di bawah umur bahwa :

“Saya berhenti sekolah karena orangtua saya merasa bahwa menikah adalah salah satu jalan terbaik. Tetap lanjut sekolah pun juga ujungnya akan menikah juga .(Wawancara, 14 Februari 2017).

Begitu pula yang di tuturkan oleh informan, Riswandi yang mengatakan bahwa”

“Saya merasa bahwa jalan terbaik masa depan saya adalah menikah karena tetap bertahan untuk sekolahpun orangtua tidak mampu membiayai dan juga kalau saya sekolah juga nantinya akan menikah. (Wawancara, Tanggal 10 Februari 2017).

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa pemahaman akan makna pendidikan sangat minim di ketahui oleh para orangtua informan, terlihat dari cara mereka menanggapi arti pendidikan bagi masa depan anaknya. Mereka beranggapan bahwa menikah sekarang dengan berhenti sekolah juga jalan lebih baik karena pada masa depan juga anaknya pun juga akan menikah.

Selanjutnya penunuturan dari ayah Fitri, Pak Aidul yang mengatakan bahwa”

“Jika ada jodohnya yang pas baiknya di nikahkan saja. Masalah sekolah bukan jadi masalah karena yang pasti sudah ada yang bisa memberi nafkah . (Wawancara, Tanggal 19 Februari 2017).

Hal ini di sampaikan pula oleh informan, Fitri yang mengatakan bahwa”

“Orangtua saya langsung menyetujui dengan orang yang saya kenalkan, meskipun hanya melalui media sosial, dan tidak memberikan pertimbangan masalah sekolah”. (Wawancara, Tanggal 19 Februari 2017).

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa dari pelaku perkawinan di bawah umur bahwa mereka pun belum mengetahui akan makna sebenarnya akan perkawinan itu, serta tidak mengetahui dengan benar apakah arti dari perkawinan di bawah umur.

Hal ini sesuai yang di ungkap oleh beberapa pelaku perkawinan di bawah umur. Suci ketika di berikan pertanyaan tentang perkawinan dengan penuh kebingungan informan menuturkan bahwa :

Kurang lebih hidup berumah tangga lah, dan kalo perkawina di bawah umur belakangan mulai tahu bahwa orang tidak boleh menikah kalau umur terlalu muda (Wawancara 11 Februari 2017).

Selanjutnya beberapa informan yang lain seperti Muhammad Alam, Rasna, Devi Suki, Eci Suki serta Wisna pun juga menjawab pertanyaan tentang perkawinan dengan menatakan bahwa mereka tidak memahami bahwa mereka menjawab dengan singkatnya dengan kata “ tidak tahu” (Hasil wawancara Februari 2017).

Dari beberapa keterangan dan penjelasan di atas bahwa beberapa dari pelaku maupun orangtua pelaku belum memahami tentang hakikat dari pendidikan, bahkan mereka tidak mengetahui bahwa menikah pun butuh pendidikan yang baik, agar dapat memahami akan makna dari sebuah perkawinan.

Beberapa orangtua yang peneliti adakan wawancara hanya memberikan alasan yang singkat akan alasan dia merestui perkawinan anaknya. Seperti halnya dengan orangtua Fitri yang memberikan informasi bahwa tidak mereka tidak memberikan pertimbangan akan arti perkawinan sebelum menyetujui sang anak untuk memilih untuk menikah. Hal semacam ini juga memberikan gambaran bahwa orangtuapun kurang memahami akan esensi perkawinan yang seharusnya, ini perlu penyelesaian agar baik anak maupun orangtua perlu pemahaman yang baik tentang arti dari perkawinan, tentu hal tersebut dibutuhkan melalui proses belajar.

Beberapa pernyataan di atas memberikan informasi bahwa faktor selanjutnya yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah masalah rendahnya kesadaran mereka tentang arti pendidikan. Merekapun tidak menyadari bahwa menikahpun membutuhkan pengetahuan yang baik.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di kelurahan Purangi, adalah masalah teman dan lingkungan mereka bergaul. Pergaulan merupakan imbas dari lingkungan tempat berinteraksi, banyak hal yang dapat terjadi dengan salah memilih teman serta lingkungan luar untuk bergaul. Sesuai hasil observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan Purangi Kota Palopo selain karena desakan ekonomi serta rendahnya pemahaman akan pentingnya pendidikan, faktor pergaulan serta lingkungan tempat bergaul memicu terjadinya perkawinan di bawah umur.

Beberapa remaja belia yang ada di Kelurahan Purangi memutuskan untuk menikah karena pergaulan yang terlanjur membawa mereka pada kondisi yang mengharuskan mereka untuk mengakhiri masa remaja dengan menjadi kepala atau ibu rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku perkawinan di bawah umur, Maya mengatakan bahwa:

Saya di besarkan dengan keluarga yang tidak utuh orangtua saya sibuk dengan pekerjaan serta kesibukannya, sehingga saya mencari teman untuk bergaul. Teman saya membawa saya bergaul dengan teman-teman dan lingkungannya sehingga saya di perkenalkan dengan teman pria yang akhirnya menjadi teman spesial dan seiring berjalan waktu hubungan kami membuahkan hasil di luar perkawina sehingga saya harus memutuskan untuk menikah . (Wawancara 20 Februari 2017)

Hal tersebut menjelaskan bahwa teman bergaul dan lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan masa depan setiap individu, sehingga tidak jarang dari beberapa remaja terjerumus ke hal-hal yang tidak di inginkan. Selain itu faktor orangtua yang sibuk terkadang merupakan pemicu akan terjadinya hal tersebut karena sang anak yang kurang perhatian dari orangtua.

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Sanda, salah satu pelaku perkawinan di bawah umur yang mengatakan bahwa:

Keluarga saya yang sibuk dengan urusannya materi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta bapak saya yang hanya sibuk dengan teman bergaulnya mendorong saya untuk mencari tempat dan teman bergaul yang cocok pula, sehingga pada akhirnya membawa saya pada hubungan yang terjadi di luar perkawinan, alasan ini yang mengakibatkan orangtua saya harus menikahkan saya demi menutupi aib keluarga (Wawancara 19 Februari 2017).

Alasan tersebut di benarkan dan di tambahkan oleh ayah dari Sanda, yaitu Burhan yang mengatakan bahwa:

Apalagi yang harus orangtua lakukan yang paling baik selain menikahkan anaknya yang sudah terlanjur melakukan hubungan sebelum menikah dan telah menyimpan hasil di rahim anak perempuan saya. Menikahkannya adalah jalan satu-satunya yang dapat keluarga lakukan demi kelangsungan hidupnya dan nama baik keluarga. (Wawancara 19 Februari 2017).

Selain itu menurut pernyataan Devi Suki yang merupakan salah satu pelaku perkawinan di bawah umur ini, menyatakan bahwa:

Saya yang di besarkan dengan keluarga yang saat ini tidak utuh setelah ibu saya meninggal, dan ayah saya juga banyak bergaul di luar memicu saya untuk mencari teman bergaul yang bisa memberikan lingkungan yang hangat dalam berkomunikasi, akan tetapi malah terjadi pergaulan yang melampaui batas, sehingga akhirnya ada buah cinta dari pergaulan tersebut. Dan jalan terbaik adalah menikah meski umur saya masih muda. (Wawancara 26 Februari 2017).

Kemudian Eci Suki yang merupakan adik kandung dari Devi Suki juga menambahkan bahwa:

Dengan masa depan pendidikan setelah lulus SMP yang tidak tahu akan seperti apa juga menjadi alasan untuk mencari teman bergaul serta teman curhat untuk menceritakan masalah yang di hadapi sehingga pertemuan yang sering ini mengakibatkan ada hubungan yang tidak seharusnya, sehingga perkawina merupakan jalan terbainya. (Wawancara 26 Februari 2017).

Dari uraian diatas memberikan penjelasan bahwa kondisi keluarga memberikan jalan kepada sang anak untuk melakukan hal-hal yang akan membawanya pada kondisi yang akan menghancurkan masa depannya. Sesuai pengamatan yang peneliti lakukan pada beberapa keluarga seperti keluarga pak Burhan bahwa si anak melakukan hal tersebut oleh karena keputusan orangtua yang memutuskan pendidikannya sehingga informan mencari jalan untuk mencari hiburan melalui teman dan tempat bergaul. Hal ini dilakukan karena informan ingin mencari tempat yang bisa membuatnya terhibur dalam kosongnya aktivitas.

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan saudara Muhammad Alam menyatakan bahwa:

Kondisi orangtua saya yag sibuk mendorong saya untuk mencari teman untuk menghibur diri. Hingga saya merasa menemukan tempat atau lingkungan dan teman bergaul, sehingga terjadilah hubungan yang tidak direncanakan. Meskipun ini bukan sepenuhnya salah orangtua tapi lebih kepada saya yang merasa akan lebih baik bergaul di luar dari pada harus d rumah terus. (Wawancara 20 Februari 2017).

Badari selaku bapak dari Muhammad Alam pun juga menambahkan dengan menyatakan bahwa:

Meskipun orangtua sibuk dorongan dari diri si anak juga sangat mempengaruhi untuk memilih teman maupun lingkugan bergaul, karena selaku orangtua saya sudah berusaha mengontrol pergaulan anak saya, akan tetapi si anak ini yang memiliki seribu cara untuk tetap begaul dengan teman pilihannya, meskipun kami selaku orangtua sudah melarang. (Wawancara 20 Februari 2017).

Dengan pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa tidak semua akibat pergaulan merupakan kesalahan dari orangtua, pola perilaku dan perubahan dari anak juga merupakan pemicu terjadinya pergaulan yang tidak terkontrol.

Hal yang hampir serupa juga dikemukakan oleh Suti Madao ayah dari Firda Suci Madao bahwa:

Alasan sibuk saja bukanlah alasan yang sangat mendorong terjadinya hal-hal yang negatif yang dapat terjadi pada si anak, karena selaku orangtua kami sudah berusaha mengontrol pergaulan anak kami, akan tetapi perkembangan pergaulan remaja dewasa ini sangat berkembang pesat dengan adanya kecanggihan teknologi, sehingga kontrol dari orangtua sering terlepas karena kemampuan kami selaku orangtua yang masih kurang dalam mengakses teknologi yang di gunakan oleh anak remaja kami. (Wawancara 24 Februari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kecanggihan teknologi juga merupakan kendala yang dirasa sulit ntuk memberikan pengawasan terhadap anak dalam bergaul, hal ini di akibatkan karena ketidak mampuan orangtua dalam mengakses dunia teknologi yang berkembang secara pesat.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara ibu Rosdiana selaku ibu dari Wisda mengatakan bahwa:

Kepercayaan orangtua juga terkadang di dimanfaatkan oleh anak untuk melakukan kemaunnya dengan teman bergaul mereka. Orantua yang sangat percaya kepada putrinya bahwa pada pagi hari sampai sore hari anaknya sedang menempuh pendidikan pada sekolah yang di tuju, ternyata bolos dan keluar dengan teman bergaul mereka, sehingga buka ijazah dan harapan baik sebagai hadiah kepada orangtua, akan tetapi buah cinta teman bergaullah yang di bawa ke rumah sebagai alasan yang mengharuskan anak perempuannya menikah pada usia sekolah (Wawancara, 24 Februari 2017).

Dari penjelasan tersebut memberikan kesimpulan pada peneliti bahwa teman dan tempat bergaul juga merupakan salah satu pemicu terjadinya perkawinan di bawah umur, ini terjadi karena adanya pergaulan yang bebas sehingga membawa para remaja untuk melakukan hal yang akan membawanya untuk mengambil keputusan untuk menikah pada umur yang masih dini.

Faktor lain menjadi alasan yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur adalah faktor budaya, dimana pada daerah tertentu masih menjunjung nilai leluhur dan masih mempertahankannya sebagai prinsip keluarga yang turun-temurun. Nilai dalam budaya tersebut mereka pelihara, budaya tersebut adalah budaya malu atau di Kelurahan Purangi yang merupakan keturunan Luwu yang masih dekat pula dengan budaya Toraja yang merasa malu apabila ada aib keluarga yang menjadi buah bibir di masyarakat luas, sehingga dalam keluarga segera mungkin mengantisipasi masalahnya, dengan mencari penyelesaian masalahnya sesegera mungkin agar tidak menciptakan suasana yang menyebabkan keluarga mereka merasa malu.

Budaya malu (Siri') tersebut juga menjadi salah satu pemicu terjadinya perkawinan di bawah umur, pada remaja yang ketahuan melakukan hubungan yang melebihi hubungan pertemanan biasa. Pada keluarga yang menjunjung budaya malu (Siri') tersebut tidak akan membiarkan anaknya menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar karena memiliki pasangan kekasih yang belum sah, sehingga menikahkan anak dengan pasangannya tersebut menjadi cara penyelesaian masalahnya.

Seperti yang peneliti amati dalam proses observasi, bahwa beberapa anak yang masih tergolong masih sangat belia harus mengakhiri masa kanak-kanak mereka karena harus di kawinkan, meskipun sepasang kekasih ini belum tentu tahu akan esensi dari perbuatan yang akan menjadi penyelesaian masalah mereka. Tidak jarang calon pasangan mereka belum di ketahui secara baik oleh orangtuanya karena pengenalan mereka yang hanya sepintas.

Hal ini sejalan dengan penuturan yang disampaikan oleh orangtua Rasna, yang mengatakan bahwa :

Saya dan suami kenal dalam waktu yang sangat singkat, tepatnya baru dua kali bertemu secara langsung karena perkenalan saya di mulai dari sosial media tepatnya pada akun Facebook. Kemudian kami janjia bertemu di salah satu tempat yang tidak jauh dari rumah, dan hal itu di ketahui oleh orangtua saya sehingga pihak ibu saya langsung menyuruh saya menikah, meski hal ini sempat di tentang oleh ayah saya, akan tetapi ibu sya tetappada prinsip malu. (Wawancara 30 Januari 2017).

Hal ini di benarkan serta di tambahkan oleh Rana, ibu dari Rasna menuturkan bahwa:

Untuk apa memelihara duri, sebagai orang kampung yang tidak punya pendidikan dan ekonomi yng baik, menjaga martabat keluarga merupakan hal yang utama. Meskipun dia masih sekolah tapi karena dia sudah berani mengambil tindakan, maka harus menanggung akibatnya. Meskipun baru kenal dalam waktu singkat, tapi jika sudah saling suka dan bisa memberi nafkah, baiknya di kawinkan saja agar tidak membuat malu keluarga. (Wawancara 30 Januari 2017).

Berdasarkan penuturan ibu Rana, peneliti dapat meberikan gambaran bahwa alasan menjaga nama baik keluargalah yang ingin di lakukan oleh orangtua tersebut dan tidak memikirkan akibat yang akan tibul selanjutnya.

Hal yang serupa di alami oleh Eviyanti yang merupakan peserta didik pada salah saru sekolah dasar (SD) tepatnya pada Madrasah Intidayyah (MI) yang ada diKelurahan Purangi mengatakan bahwa:

Saya tidak menyangka banhwa perkenala singkat saya akan mengakibatkan saya menikah dan meninggalkan bangku sekolah pad usia saya ini. Orangtua saya tidak ingin pertemuan saya dengan suami saya inimenjadi pembicaraan di masyarakat sehingga orangtua saya mengambil kesimpulan untuk menikahkan kami. Meski dia belum mengenal baik suami saya pada saat itu. (Wawancara, 19 Februari 2017).

Ibu Irawati yang merupakan wakil Kepala sekolah sekaligus keluarga terdekat dari Eviyanty maupun Rasna, menyatakan bahwa:

Benar baik Rasna maupun Eviyanti, menikah oleh karena prinsip yang besasal dari budaya malu (Siri') yang masih di anut turun-temurun. (Wawancara 19 Februari 2017).

Kemudian Ibu Hasni selaku keluarga dan RT pada wilayah tersebut membenarkan dan menambahkan pernyataannya bahwa:

Keteguhan prinsip dan budaya malu yang masih di pegang erat oleh keluarga tersebut memang masih kental sampai sekarang, sehingga hal ini terkadang mendatangkan di lema bagi kami yag di percayakan sebagai aparat yang harus menjadi tempat berdiskusi masyarakat untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan warga. (Wawancara 19 Februari 2017).

Dari penjelasan tersebut memberikan tambahan informasi tentang hal yang melatar belakangi perkawinan di bawah umur pada peneliti bahwa budaya Siri' atau maluyang masih di pegang teguh oleh beberapa keluarga juga merupakan salah satu pemicu terjadinya hal tersebut pada para pelaku perkawinan tersebut.

2. Akibat Perkawinan di bawah umur pasca Perkawinan

Setiap perbuatan akan memiliki akibat baik itu bersifat positif ataupun negatif, begitupula dengan perkawinan, dimana menjadi jalan penyatuan dari dua prinsip atau pribadi yang berbeda menjadi satu dalam bingkai rumah tangga. Dalam prosesnya akan melalui serangkaian tahap demi tahap untuk menyesuaikan pribadi satu dengan yang lainnya. Proses pendewasaan diri ini pula harus di hadapi dengan cara yang matang dan dewasa, agar dapat saling sejalan. Kematangan berfikir ini perlu di pertimbangkan sehingga penentuan usia untuk

menikahpun menjadi hal sangat penting, karena dengan kematangan usia saja belum tentu dapat berfikir dewasa dalam proses berumah tangga, apalagi jika pada usia yang seharusnya berada pada tahap pertumbuhan. Perkawinan dengan usia belia atau di kenal dengan perkawinan di bawah umur ini tentu banyak memberikan akibat yang dapat di rasakan langsung baik dari pihak keluarga maupun dari masyarakat sekitar. Pada pasangan belia tidak sedikit memberikan masalah baru sebagai akibat dari keputusan yang mereka sepakati tersebut baik bagi diri, keluarga maupun masyarakat sekitarnya.

Salah satu yang merupakan dampak yang banyak terjadi pada perkawinan di bawah umur adalah tingginya angka perceraian. Dengan usia yang masih belia mengakibatkan kurangnya kedewasaan dalam bersikap serta masih minimnya cara untuk berfikir dalam menyelesaikan perbedaan pada masing-masing individu, sehingga tak jarang menimbulkan perselisihan yang hebat yang harus berimbas pada keputusan perceraian.

Melalui hasil observasi yang peneliti laksanakan di Kelurahan Purangi, bahwa perkawinan usia muda ini banyak sekali yang harus berahir atau gagal. Tidak jarang beberapa diantara hanya berlangsung dengan waktu yang sangat singkat. Ada yang usia perkawinan yang mencapai tahunan tp ada beberapa yang hanya terhitung bulan ataupun minggu.

Hal ini sesuai yang di ungkapkan oleh salah satu pelaku perkawinan di bawah umur. Devi Suki yang mengatakan bahwa :

“Usia perkawinan saya hanya sekitar semingguan, bahkan sampai sekarang saya tidak memahami betul permasalahan mendasar sehingga mantan suami saya pergi meninggalka saya”(Wawancara, Tanggal 26 Februari 2017).

Hal yang hampir senadapun di sampaikan oleh Maya pada saat wawancara bahwa:

Kalo di tanya tentang lamanya perkawinan saya, pokoknya kurang dari satu minggu saja. (Wawancara 20 Februari 2017).

Muhammad Alam juga menyatakan dalam pada saat proses wawancara bahwa:

Yang menjadi dampak besar yang di rasakan adalah komunikasi sehingga lama perkawinan bertahan kurang dari dua bulan saja. (Wawancara 20 Februari 2017).

Begitu pula yang di ungkapkan oleh orangtua dari Wisda, ibu Aprianti mengatakan bahwa:

Dalam perkawinan pada usia yang masih terlalu muda sebelumnya telah di sadari, akan tetapi latar belakang terjadinya yang tidak dapat di hindari, maka mau tidak mau mereka harus dikawinkan. Sebagai akibatnya Wisda hanya dapat mempertahankan perkawinanya dalam kurang lebih dari dua bulan, sehingga kita dari pihak keluarga harus merawat bayi kembarnya di usia kami yang sudah tidak muda lagi. (Wawancara, 24 Februari 2017).

Hal tersebut di benarkan oleh Wisda yang merupakan pelaku perkawinan di bawah umur tersebut, menyatakan bahwa:

Meski telah mengorbankan pendidikan saya dan memutuskan menikah, tetap saja perkawinan saya hanya berusia kurang lebih hanya bertahan selama dua bulan (Wawancara 19 Februari 2017).

Pernyataan tersebut di benarkan oleh imam Kelurahan dan imam masjid Kelurahan Purangi yang sekaligus menjadi tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

Keputusan menikah muda tersebut lah yang menambah daftar masalah dalam kasus rumah tangga, dan kasus yang paling tidak di inginkan adalah berakhirnya pada perceraian. (Wawancara 12 Februari 2017).

Dari beberapa penjelasan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa salah satu akibat yang akan timbul dari perkawinan di bawah umur tersebut adalah masalah perceraian.

Sesuai dengan uraian tentang latar belakang dari perkawinan di bawah umur di lokasi penelitian ini berlatar belakang pada tingkat kesadaran akan pendidikan yang rendah. Seperti yang kita ketahui bahwa Negara Indonesia mempunyai visi untuk mewujudkan pendidikan 9 tahun sehingga di adakanlah pendidikan gratis, dengan begitu akan mewujudkan warga negara Indonesia yang berpendidikan. Pada usia anak, setiap dari mereka dituntut untu merasakan pendidikan yang baik, hal ini diharapkan mampu mengarahkan masa depan setiap individu tersebut.

Hal ini merupakan salah satu tujuan dari dengan adanya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (2)). Terlepas dari hal tersebut di indonesia masih banyak anak yang harus putus sekolah karena beragam alasan, tak jarang ha ini terjadi karena kurangnya kesadaran pada orangtua atau walinya akan fungsi dan peranan pendidikan bagi setiap pengampuhnya. Dikelurahn Purangi, salah satu faktor yang peneliti dapatkan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan salah satu dari dari beberapa faktor yang mengakibatkan beberapa anak harus putus sekolah, meski hal tersebut di tanggapioleh beberapa orang dengan alasan ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut, dari pengamatan serta wawancara hal ini di benarkan oleh beberapa pelaku dari perkawinan di bawah umur. Seperti yang Rasna sampaikan pada saat wawancara bahwa :

Benar, waktu saya menikah saya masih sekolah, sesudah menikah saya terpaksa harus putus sekolah karena saya malu dengan teman-temannya saya, meskipun saya terkadang masih ingin sekali ikut sekolah, akan tetapi selain malu saya juga harus meminta izin sama suami saya dan saya takut akan hal itu (Wawancara, 30 Januari 2017).

Selain Rasna, Fitri yang merupakan salah satu dari pelaku perkawinan di bawah umurpun juga merasakan hal yang sama, dan mengatakan bahwa :

Masalah sekolah sampai sekarang masih menjadi pikiran saya, tapi kondisi saya yang telah menikah dan memiliki anak, sehingga untuk melanjutkan pendidikan harus di pertimbangkan terlebih dahulu (Wawancara, 19 Februari).

Hal yang sama di ungkapkan oleh Wisna pelajar yang sementara duduk di bangku kelas 2 pada salah satu Madrasah Tsanawiah (SMP), mengatakan bahwa :

Setelah menikah pastinya saya malu untuk kembali lagi bersekolah, dan sekarang pekerjaan menjadi istri yang harus di jalani, (Wawancara, 14 Februari 2017).

Selain Rasna, Fitri dan Wisna, hal serupa juga di alami oleh hampir kesemua pelaku perkawinan di bawah umur yang menjadi informan pada penelitian ini. Mereka memberikan komentar masalah sekoah dengan penuturan yang hampir serupa.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran akan dampak yang di timbul pada anak se usai menikah. Mereka yang masih rindu akan bangku sekolah, harus memendam hal tersebut, oleh karena perasaan canggung, malu, serta tanggung jawab baru sebagai pendamping hidup pasangannya. Bagi mereka tanggung jawab setelah menikah juga harus di pertimbangkan abila mereka berfikir akan kembali

untuk bersekolah. Jadi dapat di simpulkan bahwa adanya perkawinan di bawah umur di kelurahan Purangi tersebut adalah menambah angka putus sekolah.

Dampak lain tidak hanya di rasakan oleh pelaku perkawinan di bawah umur, akan tetapi juga berimbas ke keturunan atau anak mereka. Akibat dari terlalu muda untuk memutuskan menikah, sehingga kematangan dalam berfikir serta pengambilan keputusan pu juga terkadang terkesan tergesa-gesa bahkan mereka tidak jarang memutuskan berpisah pun dengan cepat meski hal tersebut masih dapat di pertimbangkan oleh keduanya. Keadaan seperti itulah yang kemudian menyeret anak yang tidak berdosa ke masalah masa depan mereka kelak.

Perceraian dini akibat perkawinan di bawah umur, menyeret anak pada kondisi yang tidak seharusnya mereka alami, dimana pada masa ini, seharusnya mereka mendapatkan kasih sayang serta perlindungan. Dalam pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan ...” (Undang-undang No. 23 Tahun 2002). Pada pasal tersebut anak di harapkan mampu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, akan tetapi dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis tidak jarang anak menjadi korbannya. Seperti yang peneliti dapatkan pada saat pengamatan atau observasi, ada beberapa anak karena orangtuanya yang berpisah mereka harus di besarkan oleh keluarga lainnya.

Hal ini sesuai yang orangtua dari Maya, pak Rapo yang menyatakan bahwa:

Dengan usia perkawinan singkat anak saya, di tambah dengan dia yang masih sangat muda sehingga tanggung jawab akan anak masih sangat kurang, sehingga anaknya terkadang di tinggalkan untuk bergaul dengan teman sebaya, di tambah lagi bapak dari anak tersebut tidak memberikan sama sekali hak anaknya sehingga, sang anak harus di rawat oleh saya dan anggota keluarga lainnya. (Wawancara, 20 Februari 2017).

Hal ini pun juga di tuturkan oleh orangtua dari Wisda yang di karuniaai buah hati yang kembar, Saleh Guntur dan Rosdiana yang menyatakan bahwa :

Dengan kondisi perkawinan muda anaknya dan pada saatselesai menikah suaminya pun pergi meninggalkan Wisda, jadi saya yang sudah seharusnya menikmati usia tua terpaksa harus menjadi orangtua untuk cucu kami, oleh karena kondisi dari Wisda juga yang sama sekali tidak peduli dengan anaknya, (Wawancara, 24 Februari 2017).

Dari penjelasan di atas, bahwa orangtua atau keluarga menjadi sasaran dengan adanya perkawinan di bawah umur yang berusia singkat. Dengan kondisi orangtua yang juga masih harus menafkahi keluarga lainnya harus pula di bebani dengan merawat bayi dari anaknya.

Masih dengan masalah yang sama yang juga dirasakn oleh Devi Suki, yang mengatakan bahwa :

Saya harus ekstra untuk membesarkan anak saya, karena dengan usia perkawinan saya yang singkat dan saya yang tidak memilki pekerjaan, sehingga saya harus banyak bergantung kepada keluarga dari orangtua saya. Suami saya pergi dan tidak memberikan tanggung jawabnya kepada anaknya, (Wawancara, 26 february 2017).

Kejadian tersebut memberikan gambaran bahwa selain masalah perceraian dan putus sekolah, anak pun juga bisa menjadi salah satu dampak dari perkawinan di bawah umur. Hal semacam inilah yang perlu perhatian dari beberapa kalanga

sebelum terjadinya perkawinan di bawah umur dengan segala latar belakang serta akibat yang akan timbul dengan adanya perkawinan di bawah umur tersebut.

3. Bentuk pencegahan terhadap akibat perkawinan di bawah umur

Dari beberapa uraian di atas tentang dampak yang akan di timbulkan dengan adanya perkawinan di bawah umur, maka hal ini perlu menjadi perhatian bagi kaum remaja, jika ingin menikah muda. Uraian di atas memberikan pertimbangan akan dampak negatif yang akan timbul selain dari dampak positifnya. Harapan ke depan agar tidak lagi perkawinan di bawah umur yang berdampak negatif ini menjadi tanggung jawab tidak hanya orangtua atau diri pribadi remaja saja, akan tetapi lebih baik jika hal tersebut menjadi perhatian kita bersama. Dengan demikian akan tercipta keselarasan dalam masyarakat.

Seperti beberapa harapan dari beberapa informan yang kiranya menjadi salah satu solusi kedepannya agar tidak terjadi dampak setelah menikah, karena tidak adanya kematangan sebelum memutuskan menikah. Banyak hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan yang merupakan salah satu solusi dalam meminimalisir dampak tersebut, diantaranya pendidikan, artinya kualitas pendidikan kita perlu mendapat perhatian sehingga setiap perbuatan dapat diketahui terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk melakukannya.

Harapan akan perbaikan dari sisi pendidikan ini sesuai dengan di harapkan oleh informan yang merupakan tokoh pendidikan yang ada di kelurahan Purangi kota Palopo, kepala sekolah MI Ddi 3 Purangi, Marno P. S.Pd. yang menyatakan bahwa :

Solusi terbaik dalam mengatasi perkawinan di bawah umur ini adalah perbaiki pendidikan kita, dan perlu sekali hal ini di perhatikan oleh setiap orangtua, (Wawancara 1 Februari 2017).

Pejelasan tersebut selaras bahkan ydi tambahkan oleh tokoh agama sekaligus imam Masjid RW 06 Kelurahan Purangi, Pak Rasuli menyatakan bahwa:

Pendidikan ini harus menjadi perhatian serta bisa menjadi solusi dari dampak yang timbul dari perkawinan di bawah umur tersebut. Dan yang paling penting adalah penanaman pendidikan agama yang baik dalam keluarga. (12 Februari 2017).

Dari kedua pernyataan tersebut, pendidikan merupakan salah satu masukan yang baik agar setiap pasangan yang akan menikah mengetahui akan arti serta tujuan dari perkawinan. Selain calon pengantin orangtua pun sangat penting memberikan pemahaman yang baik tentang arti, fungsi dan tujuan perkawinan, sebelum sang anak memutuskan untuk melaksanakan perkawinan.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka pada Bab yaitu pembahasan hasil penelitian untuk mengetahui lebih lanjut tentang (1) latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur, (2) Dampak yang terjadi pasca Perkawinan, (3) Bentuk pencegahan terhadap dampak negatif dari perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi kota Palopo.

1. Latar belakang terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo.

1) Ekonomi

Masalah ekonomi ini merupakan alasan yang banyak digunakan oleh banyak kalangan untuk mencari jalan pintas untuk menyelesaikannya, meski tak

jarang hal tersebut mendatangkan masalah baru dalam kedupan selanjutnya. Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, maka agar tidak terus membebani secara ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak, orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar bisa segera mandiri. Sayangnya, para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.

Indonesia yang di kenal kaya akan sumber daya alamnya ini, di sebagian daerahnya masih tergolong daerah yang miskin, baik itu di kota ataupun daerah terpencil. Pada daerah tertentu tidak jarang masyarakatnya yang masih miskin mencari jalan yang di rasa pintas untuk mendapatkan kebutuhannya. Dari fenomena tersebut tidak jarang orangtua menjadikan alasan tersebut untuk mengawinkan muda anaknya, bahwa dengan adanya perkawinan anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya) (Soekanto 1992 : 65).

Masyarakat Kelurahan Purangi tidak semua dapat mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga karena keadaan ekonomi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya berbeda. Masyarakat di Kelurahan Purangi mempunyai mata pencaharian yang beranekaragam. Mata pencaharian tersebut antara lain petani, buruh, peternak, industri kecil, jasa dan PNS. Masyarakat Kelurahan Purangi lebih banyak bekerja sebagai petani.

Bagi orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap maka mereka dengan mudahnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi beda halnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mudah. Di Kelurahan Purangi kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah atas dan menengah ke bawah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda, ada yang cukup, sedang dan lebih.

Maksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang tidak permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap. Keluarga yang kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang memiliki tempat tinggal semi permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi.

Kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda, ada yang cukup, mampu, cukup mampu, dan tercukupi. Maksud cukup, cukup mampu, dan tercukupi ini, seperti kebutuhan keluarga ada kebutuhan primer kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer seperti sandang, makan, dan papan, kebutuhan sekunder seperti, pendidikan, rekreasi, dan kebutuhan tersier misalnya, memiliki kendaraan (motor, mobil dan lain sebagainya). Masyarakat Kelurahan Purangi tidak semuanya mampu mencukupi kebutuhan seperti yang dipaparkan di atas, seperti

kebutuhan skunder, masyarakat Kelurahan Purangitidak semuanya mampu memenuhi kebutuhan itu, karena keterbatasan biaya yang mereka miliki.

Bagi keluarga yang sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga maka ia dapat dengan mudahnya untuk mencapai semua yang diinginkan, halnya berbeda dengan keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari/pun kebutuhan keluarga sangatlah sulit. Maka jalan satu-satunya yang mereka lakukan dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur, dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur mempunyai harapan besar, salah satunya dapat membantu mencukupi kebutuhan kedua belah pihak yaitu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, lebih-lebih mempelai perempuan. Padahal menikahkan anak di bawah umur bukan jalan satu-satunya, masih banyak harapan untuk masa depan anak yang lebih baik selain menikah.

2) Rendahnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan

Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.

Orang tua menikahkan anak karena mereka kurang mengerti ataupun faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Ia hanya melihat anak sudah besar atau sudah kelihatan dewasa, ia pikir hal seperti itu sudah cukup untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Begitu juga dengan anak yang hanya lulus sekolah dasar atau yang masih dalam kondisi belajar baik pada bangku sekolah dasar ataupun pada bangku sekolah menengah pertama, belum begitu luas tentang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi mengerti ataupun faham sebuah perkawinan yang ideal, sehingga mau untuk dinikahkan karena masih menuruti sama orang tua, orang tua menginginkan menikahnya, sebagai seorang anak tidak menolaknya. Dengan anaknya menikah orang tua merasa senang dan bahagia. Sebagai seorang anak tidak dapat untuk menolaknya karena ketika seorang anak tidak mau untuk dinikahkan orang tua merasa kecewa. Ketika seorang anak ingin melanjutkan sekolah ke SLTP tetapi orang tua tidak mengijinkan dengan alasan tidak ada biaya atau alasan-alasan yang lainnya.

Kebanyakan masyarakat melangsungkan perkawinan di bawah umur tidak hanya karena keadaan ekonomi yang tidak mampu ataupun kurang mampu tetapi karena rendahnya kesadaran orang tua maupun anak yang tidak memiliki pengetahuan ataupun pengalaman yang luas tentang fenomena disekitarnya. Orang tua tidak begitu memikirkan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya untuk meraih masa depan yang lebih baik selain menikah. Orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah (buta huruf), orang tua jaman dulu yang pemikirannya masih belum maju seperti sekarang ia hanya merasa senang dan bahagia ketika anaknya ada yang melamarnya, orang

tua merasa lega ketika anaknya sudah menikah dan lain sebagainya, ia tidak berfikir ketika anaknya menikah masih di bawah umur, dilihat pendidikannya pun hanya lulus sekolah dasar dan lain sebagainya tetapi ia tetap melangsungkannya. Sebagai tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak dapat melarang keras bahwa perkawinan di bawah umur tidak boleh dilaksanakan karena ketika orang tuanya saja sudah mengizinkan, tidak ada yang bisa dilakukan selain mengizinkannya.

Memang pendidikan sangat penting bagi orang tua maupun anak, karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang luas ia dapat mempertimbangkan kembali apa yang mau dilakukan, seperti halnya menikah jika pendidikan ataupun pengetahuan mereka kurang maka ia hanya berfikir pendek. Ia mengira dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur dapat menjadi tenang dan senang karena sudah tidak memiliki beban lagi, tetapi jika lebih difahami mendalam malah kasihan anak masih di bawah umur sudah harus menjalankan yang semestinya belum saatnya mereka lakukan yaitu menjalankan rumah tangga sebagaimana mestinya, itu terjadi karena pendidikan ataupun pengetahuan orang tua maupun anak yang terbatas.

Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Dengan putusnya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka.

3) Teman dan Lingkungan bergaul

Teman dan lingkungan bergaul merupakan salah satu pemandu masa depan, oleh karena memilih teman dan lingkungan bergaul juga sangat penting. Pada fase pertumbuhan anak terkadang mereka beranggapan bahwa mereka kurang di perhatikan, apalagi bagi keluarga yang memiliki persoalan-persoalan yang komplit. Dengan masalah yang ada terkadang anak merasa kurang bahagia, diantara masalah tersebut juga terkadang karena ada komunikasi yang terkadang renggang, atau kurang sepaham. Banyak persoalan yang mengganggu kebahagiaan hidup, adalah masalah hubungan orang tua dengan anaknya yang telah dewasa. Tidak jarang banyak orang tua yang mengeluh terhadap sikap anaknya. Orang tua yang merasa kalau anaknya tiba-tiba menjadi nakal, suka melawan, tidak patuh, dan sering membuat masalah.

Diantara beberapa remaja, yang merasa kurang dimengerti oleh orang tuanya, sehingga mereka menjadi bingung, cemas, dan gelisah. Dengan perasaan itulah mereka mudah terkena pengaruh yang tidak baik dari luar. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini, makin banyak kenyataan hidup yang tidak menyenangkan terutama dalam hal masyarakat modern ini. Dimana agama tidak lagi diindahkan, mungkin akibat teknologi yang sudah sangat maju.

Keluarga dan rumah merupakan pelabuhan yang aman dan tambatan yang kokoh bagi setiap anggota keluarga terutama remaja. Ayah, ibu, dan anak adalah suatu basis dimana secara teratur dan harmonis seluruh keluarga berkumpul untuk berkomunikasi dan berbincang-bincang baik dalam hal yang menggembirakan ataupun ketika sedang menghadapi kesulitan.

Keluarga merupakan kesatuan daripada masyarakat kecil, yang mempunyai motivasi dan tujuan hidup tertentu dimana ayah, ibu, dan anak mempunyai fungsi dan tanggungjawab saling mengisi.

Memilih teman bergaul sangat penting untuk masa depan, sehingga hal ini juga butuh pertimbangan yang matang bagi setiap individu. Meskipun terkadang ada pribadi yang kuat terhadap prinsipnya, akan tetapi hal itu sangat sedikit jumlahnya. Pada fase remaja, saat itulah terjadi pencarian jati diri, oleh karenanya teman bergaul bisa membawa perubahan besar dalam perubahan jati diri tersebut. Terlepas dari teman bergaul, lingkungan tempat bergaul pula harus diperhatikan betapa banyak pribadi yang terjemur ke jurang yang negatif oleh karena lingkungan yang mereka tempati. Dari kedua hal tersebut penting kiranya untuk dipertimbangkan. Seperti hal yang peneliti amati dan dapatkan melalui observasi dan wawancara, bahwa ada beberapa pelaku perkawinan di bawah umur ini, karena berawal dari kesalahan mereka dalam memilih teman serta membawanya ke lingkungan yang kurang kondusif, atau bisa dikatakan lingkungan yang bebas.

4) Faktor Malu (Siri')

Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing, hal ini terkadang menjadi keunikan ataupun ciri khas setiap daerah. Beragam budaya tersebut bisa menjadikannya berbeda dengan wilayah yang lain. Selain keunikannya terkadang ada beberapa adat atau kebiasaan yang menjadi budaya yang sebenarnya bersempangan dengan aturan yang ada, baik aturan hukum maupun aturan agama. Seperti halnya dengan perkawinan, di beberapa daerah di Indonesia melegalkan perkawinan meskipun usianya masih tergolong masih sangat muda.

Tidak jarang perkawinan pada masyarakat adat bertentangan dengan aturan yang ada di Indonesia.

Sama halnya dengan kelurahan Purangi Kota Palopo yang beberapa masyarakatnya masih mempertahankan budaya turun temurun, sehingga masalah perkawinan pun tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, budaya malu atau siri' juga menjadi budaya yang masih dijunjung tinggi oleh beberapa masyarakat yang ada di kelurahan Purangi. Budaya ini membawa beberapa masyarakat menikahkan anaknya yang masih tergolong di bawah umur, karena mereka tidak ingin anaknya melakukan hal-hal yang bisa menjadi buah bibir di masyarakat sekitar.

2. Akibat Perkawinan di bawah umur pasca Perkawinan

Pada bab sebelumnya telah peneliti uraikan tentang latar belakang dari perkawinan di bawah umur, perkawinan dengan umur yang belum matang seperti ini memiliki beberapa akibat yang ditimbulkan antara lain:

1) Perceraian

Kondisi perkawinan di bawah umur terkadang mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, sehingga tidak jarang hal ini mengakibatkan perceraian dini. Kondisi komunikasi yang kurang baik serta perkawinan yang diawali dengan latar belakang yang tidak kondusif sehingga setelah menikah beberapa pasangan hanya berumur singkat dan akhirnya bercerai.

Hal ini senada dengan pendapat William J. Goode bahwa pernikahan dini tidak jarang menimbulkan banyak masalah yang sangat pelik di dalam rumah tangga, dan kerap berakhir perceraian. (William J. Goode, 1985 : 194). Jadi

penting kiranya untuk mempertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan untuk menikah di bawah umur.

2) Menambah daftar putus Sekolah

Perkawinan di bawah umur ini, dapat di simpulkan sebagai daftar individu yang putus sekolah, dan bahkan ada yang tidak sempat mengenyam pendidikan baik pada jenjang yang dasar. Kesempatan mereka untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi menjadi mimpi bahkan tidak sedikit pula yang tidak menyelesaikan bangku pendidikan dasar, akibatnya banyak di antara mereka yang buta aksara.

Seperti hal yang ada di kelurahan Purangi Kota Palopo beberapa pelaku perkawinan di bawah umur harus menambah daftar anak yang putus sekolah, oleh karena mereka malu untuk melanjutkan sekolahnya dengan kondisi status telah menikah atau telah menjadi janda. Kondisi ini merupakan hal yang di tentang oleh Undang-undang Perlindungan anak pasal 4 “ setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya,..”.

3) Penelantaran Anak

Dengan dampak perceraian akibat perkawinan di bawah umur, sehingga menyebabkan terjadinya penelantaran anak, beberapa anak dari hasil perkawinan di bawah umur atau yang memiliki umur perkawinan yang singkat, mengakibatkan beberapa anak harus terlantar. Hal ini terjadi karena beberapa remaja yang masih berumur muda, sehingga sang remaja masih tetap ingin

melanjutkan pergaulan dengan teman sebaya, sehingga anak hasil perkawinan terkadang harus di rawat oleh keluarga lainnya.

Seperti hal yang telah peneliti uraikan dalam bab sebelumnya bahwa di antara para pelaku perkawinan di bawah umur yang bercerai muda, menelantarkan anaknya, hal tersebut seperti tidak memberi nafkah serta tidak memberikan hak-hak lain yang di butuhkan dalam tumbuh kembang anak.

Di kelurahan Purangi hal serupa ini pun terjadi bagi mereka yang memiliki umur perkawinan yang sangat singkat, sehingga orangtua muda ini memilih meninggalkan anaknya kepada orangtua mereka, bahkan tidak jarang mereka tidak memberikan nafkah kepada sang buah hatinya.

3. Bentuk pencegahan terhadap akibat perkawinan di bawah umur

Angka perkawinan di bawah umur di indonesia terus meningkat sehingga diperlukan upaya untuk menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur.berangkat dari uraian yang telah peneliti uraikan tentang latar belakang serta dampak yang di timbulkan dengan adanya perkawinandi bawah umur di kelurahan Purangi kota Palopo, maka peneliti menyarankan beberapa bentuk pencegahan, Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Dengan kondisi wilayah yang sebagian besarnya adalah lokasi perkebunan yang menyebarkan warganya menjalani pemenuhan kebutuhan dengan hasil pertanian, maka warga masyarakat perlu meningkatkan taraf hidupnya melalui jalur pertanian yang berbasis pengetahuan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan taraf ekonomi sehingga hal tersebut bukan lagi menjadi alasan bagi para warga untuk mengawinkan muda remajanya.

2. Keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengawasan agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat mengarah pada berbagai hal negatif.
3. Perlunya pemilihan teman dan lingkungan yang baik dalam bergaul.
4. Sekolah bekerja sama dengan organisasi-organisasi sosial untuk memberikan penyuluhan atau bimbingan mengenai berbagai permasalahan sosial terutama tentang risiko pernikahan di usia muda melalui pendidikan seks dini, konseling kesehatan reproduksi juga memberikan kesadaran kepada para siswa untuk menghindari seks pranikah yang bisa mengakibatkan kehamilan.
5. Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan perlindungan anak secara optimal yaitu memenuhi hak kesehatan dan pendidikan anak-anak yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan muda yang kerap terjadi di daerah dan memantau perkembangan anak di bawah umur agar tidak terjadi lagi eksploitasi anak-anak dalam pernikahan.
6. Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai perlindungan atas hak anak tersebut termasuk menjaga anak agar tidak menikah muda.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus mengupayakan sosialisasi kepada warga untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga tamat SMA /SMK.

8. Pemerintah Indonesia harus membuat hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan untuk melindungi keamanan, kesehatan, kesejahteraan, serta hak-hak anak.
9. Pemerintah maupun kalangan masyarakat harus terus mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar perempuan dan laki-laki mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga menikah muda bukan satu-satunya pilihan hidup. Misalnya mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang pernikahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa :

1. Hal yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur ini didominasi oleh faktor ekonomi, di mana sebagian besar warga yang sebagian besar petani belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhannya sehingga menjadikan hal ini sebagai solusi, meskipun beberapa diantaranya menimbulkan akibat yang tidak sesuai yang di harapkan. kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, di mana masyarakat masih menganggap pendidikan hanya sebagai formalitas saja dan karena teman dan lingkungan bergaul, dalam hal ini banyak sekali terjadi kesalahan akibat salah memilih teman serta lingkungan bergaul, karena tak jarang hal ini membawa mereka pada perilaku yang negatif, sebagian kecil masyarakat yang masih mempertahankan budaya sehingga faktor Siri' (malu) menjadi alasan mengapa orangtua memilih menihkan anaknya.
2. Akibat yang akan timbul dengan adanya perkawinan di bawah umur, antara lainnya terjadinya perceraian dini, dimana beberapa diantara pasangan muda hanya menjalani usia perkawinan yang singkat oleh karena belum matang dalam mengambil keputusan, sehingga hal yang mungkin masih dapat di perbaiki, akan tetapi para pasangan muda tersebut memilih

untuk berpisah. Dengan keputusan menikah dini serta bercerai muda ini menambah daftar anak yang harus putus sekolah, selain itu perceraian dari adanya perkawinan yang masih sangat muda memicu terjadinya penelantaran anak.

3. Pencegahan yang dapat disimpulkan dari hasil pertimbangan dari latar belakang serta akibat yang di timbulkan dari perkawinan di bawah umur adalah, dengan meningkatkan taraf hidup serta mendorong kesadaran di sektor pendidikan. Mulailah dengan mempelajari cara mengolah kebun yang baik agar hasilnya bisa mencukupi keseharian, sehingga alasan ekonomi bukan lagi menjadi alasan untuk memilih menikah muda agar terlepas dari beban tanggung jawab sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah perbaiki kualitas pendidikan, sadarilah bahwa pendidikan memiliki masa depan yang baik bagi mereka yang menempuhnya. Kemudian perlu adanya kerjasama di antara berbagai kalangan dalam mensosialisasikan dampak serta bahaya dari perkawina di bawah umur.

B. Saran

Berpijak pada temuan-temuan tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa saran yang sekira bisa menjadi salah satu yang dapat memberikan tambahan kepada berbagai pihak, terkait perkawinan di bawah ini, sebagai berikut:

- 1) Latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Purangi Kota Palopo, antara lain ; yang mendominasi adalah faktor ekonomi dimana sebagian besar masyarakat berprofesi

sebagai petani, maka perlu kiranya masyarakat bekerjasama dengan pihak terkait tentang cara dalam meningkatkan hasil dari pertaniannya untu meningkatkan ekonomi, agar hal ini bukan lagi menjadi alasan banyak orangtua yang memilih mengawinkan di bawah umur anak remaja mereka. Kemudian anggapan orangtua tentang pendidikan yang hanya sekedar formalitas semata Perlu kiranya diluruskan bahwasanya pendidikan penting dalam segala aspek, selain itu faktor lainnya karena teman dan lingkungan bergaul, sehingga perlukiranya mengontrol denga siapa serta lingkungan manakah tempat yang baik untuk di pilih, selanjutnya menjunjung akan budaya memang sangatlah penting akan tetapi perlu pula di pertimbangka akan dampaknya.

- 2) Dari beberpa akibat yag terjadi seperti bercerai dini, maka perlu kiranya setiap pasangan berfikir yang matang dalam mengambil keputusan, agar tidak terjadi akibat lain seperti penelantaran anak dan akibat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ABD. Shomad, 2010. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Penerbit Kencana Prenada Media Group : Jakarta
- Abdurrahman. 1986, *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Adikusuma Hilman, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung. Mandar Maju.
- Arif Gosita. 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta Barat, Bhuana Ilmu Populer Gramedia.
- Ahmad. 2009. *Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama*. <http://lily-ahmad.blogspot.co.id/2009/04/perkawinan-dini-adalah-masalah-kita.html>
- Alfiah. 2010. *Faktor-faktor Pernikahan Dini*.
- Budiarto Eko.2003, *biostatistika untuk kedokteran dan kesehatan masyarakat*.: Jakarta. EGC.
- Djaja S. Meliala. 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Bandung. Nuansa Aulia.
- El Muhtaj Majda. 2009, *Dimensi-dimensi HAM mengurai hak ekonomi, social, dan budaya*: Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Hanafi Yusuf. 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, Bandung. Mandar maju
- Ihsan. 2008. *Tuntunan Praktis rumah tangga bahagia* : Surabaya.
- Ibrahim, al Bajuri. Semarang Toha Putra.
- Jaehani Libertus, 2008. *Perkawinan apa resiko Hukumnya?*. Jakarta. Forum Sahabat.
- Jauhari Imam. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Poligami*. Jakarta. Pustaka Bangsa.
- Notoatmojo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*: Jakarta, Rineka Cipta.
- Prodjodikoro Wirdjono, 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung. Sumur Batu

- Rafi Baihaqi, Ahmad. 2006, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: gita media Press.
- Rabbil sonya Gesa. 2012. *Tinjauan yuridis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Tidak di terbitkan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rasyidi Lily, 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung. Alumni.
- Rida Ichwanti Sabir, 2014. *Persepsi Masyarakat tentang Perkawinan di bawah Umur di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba*. Tidak di terbitkan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negari Makassar.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1976. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek cetakan ke 27)*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- R. Soetojo Prawiromidjojo. 1986. *Pluralisme dalam perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. Airlangga University Press.
- R. Wiryono Prodjodikoro, 2008. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung. Sumur.
- Sarlito. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Subekti, 1994. *Pokok-pokok Hukum Perdata, cetakan ke 2*. Jakarta. Intermassa.
- Sudarwan Danin, 2002. *Menjadi Peneliti kualitatif*, Bandung : Cv. Pustaka Setia.
- Sudarsono, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Sumadi Surayabrata, 2013. *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers.
- Soedharyo Soimin. 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soetojo Prawirohamidjojo. 1974, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung. Alumni.
- Sudarsono. 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Soemiyati, 1990. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cetakan ke 2*. Bandung. Banjar Maju.
- Thalib Sayuti, 1986. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- _____ 1982, *Pendidikan Hukum Untuk Masyarakat*, Yogyakarta, Pusat Penelitian dan Pengabdian masyarakat.

Wahono Darmabarata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta. Fakultas hukum Universitas Indonesia.

Wahono Darmabarata, 2003. *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya*. CV. Gita Maya Jaya.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam, Bandung. Fukus Media.

PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Proses Pengumuman dan pencatatan Perkawinan.

Undang – undang Dasar Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung, Citra Umbara.

Undang – Undang Nomoe 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. Bandung, Nuansa Aulia.

Internet

Mari belajar sosant, 2012, P.8, 21 November 2013, <http://tydar.blogspot.com/2012/01/makalah-pernikahan-dini.html>

Suparyanto, 2011, P.1-4, 21 November 2013, [http:// dr-suparyanto.blogspot.com/2011/02/konsep-pernikahan-dini.html](http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/02/konsep-pernikahan-dini.html)

ABSTRACT

ILHAM LAMAN. 2017. *Underage Marriage at Purangi Village in Palopo City* (supervised by Heri Tahir and Imam Suyitno).

The study was conducted with the objective to examine the background, the impact, and ways in minimizing underage marriage at Purangi in Palopo city.

The type of this study was qualitative with descriptive approach. Data were collected by employing observation, interview, and documentation. Data were analyzed in descriptive qualitative by conducting data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study reveal that (i) there are factors as a background of underage marriage, namely economy, low awareness on the importance of education, friends and social environment, and embarrassed (Siri') culture; (ii) the impacts due to underage marriage at Purangi village in Palop city among others are divorced, additional of drop-out school list, and children abandonment; (iii) the solutions to minimize the impact of underage marriage are there should be mutual partnership to related parties on the ways to increase the quality and product of plantation or farms so the economical problem will not be the main reason of the people to arrange the marriage for their children, improve awareness on the importance of education for children, and build partnership with government and the people to provide comprehension on the meaning and objective of marriage as well as provide understanding on the impact of underage marriage.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
PROGRAM PASCASARJANA

Kampus UNM Gunungsari Baru, Jl. Bonto Langkasa, Makassar-90222,
Telp. (0411) 830366, Telp./Fax. (0411) 855288,
Email: pasca@unm.ac.id, Laman: <http://pps.unm.ac.id>

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN SEMINAR

Berdasarkan **Seminar Hasil Penelitian** untuk Penyusunan Tesis

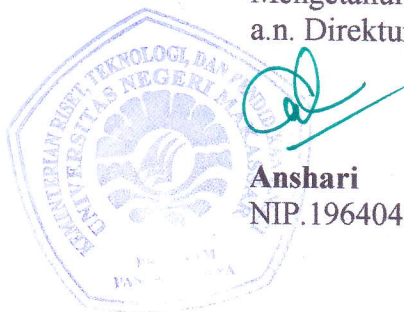
Nama : Ilham Laman
Nomor Pokok : 15B02110
Program Studi : Pendidikan IPS
Kekhususan : IPS/ Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan
Judul Tesis :

"Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo"

Oleh Tim Penilai, harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan dan telah disetujui oleh Tim Penilai.

| No. | Nama Tim Penilai | Disetujui Tanggal | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Prof. Dr. H.Heri Tahir, SH.,M.H. | 19/06/2017 | |
| 2 | Dr. Imam Suyitno, M.Si. | 19/06/17 | |
| 3 | Prof. Dr. Manan Sailan, M.Hum. | 19/06/17 | |
| 4 | Prof. Dr. Darman Manda, M.Hum. | 19/06/17 | |
| 5 | Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. | 20/06/17 | |

Makassar, 20 - 06 2017
Mengetahui :
a.n. Direktur



Anshari
NIP.196404291989031003



**PEMERINTAH KOTA PALOPO
KECAMATAN SENDANA
KELURAHAN PURANGI**

Jl. Opu Tohalide No. Telp. (0471) Kota Palopo

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Bapak Lurah Purangi Kec.Sendana Kota Palopo
Menerangkan bahwa :

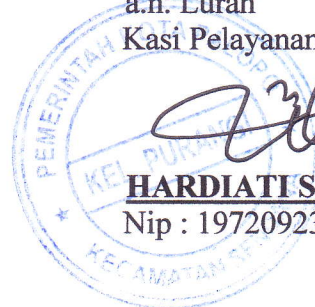
Nama : ILHAM LAMAN
NIM : 15B02110
Jurusan : IPS
Kekhususan : Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan
Judul Tesis : Perkawinan di Bawah Umur di Kel. Purangi Kec. Sendana Kota Palopo

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Purangi Kec.
Sendana Kota Palopo pada tanggal 30 Janurai s/d 30 Maret 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Purangi, 30 Maret 2017

a.n. Lurah
Kasi Pelayanan Umum



HARDIATI SAHARUDDIN, S.IP

Nip : 19720923 200701 2 013

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi
Kota Palopo

Nama : Ilham Laman

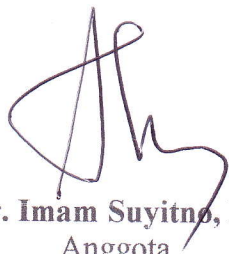
NIM : 15B02110

Program Studi : Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan

Menyetujui

Komisi penasehat,


Prof. Dr. H. Heri Tahir, SH.,MH.
Ketua

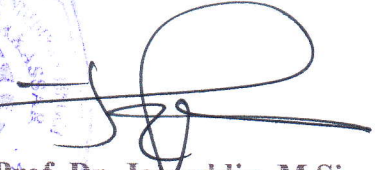

Dr. Imam Suyitno, M.Si.
Anggota

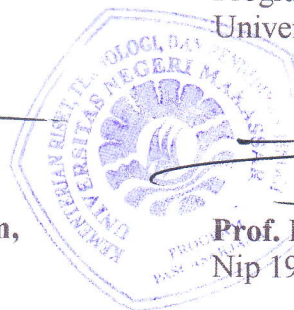
Mengetahui:

Mengetahui
19/6/17
Ketua
Program Studi IPS
Pendidikan Hukum dan
Kewarganegaraan

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar


Prof. Dr. Darman Manda, M.Hum,
Nip196501031990031001


Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.
Nip 196412221991031002





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
PROGRAM PASCASARJANA

Kampus UNM Gunungsari Baru, Jl. Bonto Langkasa, Makassar-90222,
Telp. (0411) 830366, Telp./Fax. (0411) 855288,
Email: pasca@unm.ac.id, Laman: http://pps.unm.ac.id

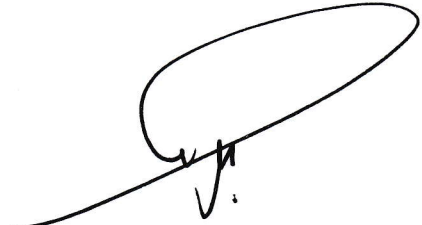
**SURAT PERNYATAAN KOMISI PENASEHAT
DAN PRENCANA JUDUL TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia untuk bertindak sebagai
Ketua / Anggota Komisi Penasihat dari :

N a m a : Ilham Laman
Nomor Pokok : 15B02100
Program Studi : Pendidikan IPS
Kekhususan : Pend. Hukum dan Kewarganegaraan

Dengan rencana judul tesis :

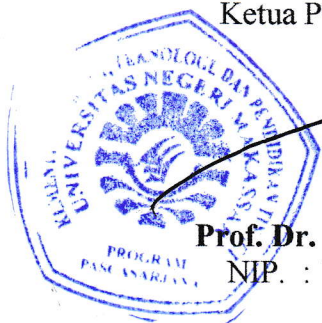
*Studi Tentang Dampak Pernikahan Dusia Muda
di Kelurahan Purangi Kota Palopo*


Prof. Dr. H. Heri Tahir, SH., M.H.
Ketua

Makassar, 29 Agustus 2016


Dr. Imam Suyitno, M.Si.
Anggota

Mengetahui
Ketua Program Studi Pendidikan IPS ,




Prof. Dr. Darman Manda, M.Hum.
NIP. : 19650103 199003 1 001



1 2 0 1 7 1 9 9 0 1 8 4

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 23692

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 185/IP/DPMPTSP/II/2017

DASAR HUKUM :

ASLI

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Palopo;

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : ILHAM LAMAN
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Opu Tohalide Kota Palopo
Pekerjaan : Karyawan Honorir
N I M : 15B02110

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan Judul :

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN PURANGI KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian 30 Januari 2017 s.d 30 Maret 2017

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **KELURAHAN PURANGI KOTA PALOPO**.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exampilar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 27 Januari 2017

a.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabid. Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

MARDI, S.Sos

Pangkat : Penata

NIP : 19830626 200801 1 003

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo di Palopo;
3. Dandim 1403 SWG;
4. Kapolres Palopo;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo di Palopo;
6. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
PROGRAM PASCASARJANA

Kampus UNM Gunungsari Baru, Jl. Bonto Langkasa, Makassar-90222,
Telp. (0411) 830366, Telp./Fax. (0411) 855288,
Email: pasca@unm.ac.id, Laman: <http://pps.unm.ac.id>

Nomor : 448/UN36.8/KM/2017
Lamp. : 1 (satu) Proposal
Perihal : *Izin Penelitian*

Makassar, 20 Januari 2017

Yth **Walikota Palopo**
Cq. Kepala Kantor Kesbampol dan Linmas
Kota Palopo

Palopo


Dengan hormat disampaikan bahwa, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar yang tersebut di bawah ini akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian studi magister.

| | |
|------------------|--|
| Nama | : Ilham Laman |
| NIM | : 15B02110 |
| Program Studi | : IPS. |
| Kekhususan | : Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan |
| Judul Penelitian | : |

Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin penelitian.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan Terima kasih.

Direktur,

Jasruddin
NIP. 1964122219910310027

Tembusan :

- Rektor UNM (sebagai laporan)
- Asdir I PPs UNM
- KPS IPS.
- Mahasiswa yang bersangkutan

Tetap Jaya dalam Tantangan



Lampiran 1**Wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah umur**



Firda Suci Madao 15 Tahun



Desi Wulandari 15 Tahun



Muhammad Alam 16 Tahun



Wisna Imran 13 Tahun



Lalla Risma 15 Tahun



Riswandi 15 Tahun



Fitri 15 Tahun



Suci 15 Tahun



Eci Suki 13 Tahun



Eviyanti 11 Tahun



Wisda Aprianti 15 Tahun

Wawancara Dengan Orangtua Pelaku



Ibu Bunga, Ibu Busu, Ibu Dina, Pak Ramli, Pak Imran

Informan Tambahan



Imam Kelurahan, Imam Masjid, Kepala MI, wakil Kepala MI

| |
|-------------------|
| Lampiran 2 |
|-------------------|

Lampiran 1. Daftar Informan

1. NAMA : RASNA
UMUR : 12 TAHUN
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
PEKERJAAN : IRT

2. NAMA : EVIYANTI
UMUR : 11 TAHUN
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
PEKERJAAN : IRT

3. NAMA : MAYA
UMUR : 13 TAHUN
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
PEKERJAAN : IRT

4. NAMA : SANDA
UMUR : 14 TAHUN
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
PEKERJAAN : IRT

5. NAMA : FITRI
UMUR : 15TAHUN
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
PEKERJAAN : IRT

6. NAMA : WISNA IMRAN
UMUR : 13TAHUN
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
PEKERJAAN : IRT

7. NAMA : MUHAMMAD ALAM
UMUR :16 TAHUN
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
PEKERJAAN : PELAJAR

8. NAMA : RISWANDI
UMUR : 15 TAHUN
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
PEKERJAAN : -
9. NAMA : LALLA RISMA
UMUR : 15 TAHUN
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
PEKERJAAN : IRT
10. NAMA : DEVI SUKI
UMUR : 15 TAHUN
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
PEKERJAAN : IRT
11. NAMA : ECI SUKI
UMUR : 13 TAHUN
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
PEKERJAAN : IRT
12. NAMA : DEDI
UMUR : 17 TAHUN
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
PEKERJAAN : PETANI
13. NAMA : DESI WULANDARI
UMUR : 15 TAHUN
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
PEKERJAAN : IRT
14. NAMA : SUCI
UMUR : 15 TAHUN
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
PEKERJAAN : IRT

15. NAMA : WISDA APRIANTI
 UMUR : 15 TAHUN
 JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
 PEKERJAAN : -

16. NAMA : FIRDA SUCI MADAO
 UMUR : 15 TAHUN
 JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
 PEKERJAAN : IRT

INFORMAN TAMBAHAN :

17. NAMA : TAMRIN
 UMUR : 63 TAHUN
 JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
 PEKERJAAN : IMAM KELURAHAN

18. NAMA : RASULI
 UMUR : 40 TAHUN
 JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
 PEKERJAAN : IMAM MASJID

19. NAMA : MARNO P S,Pd.
 UMUR : 39 TAHUN
 JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
 PEKERJAAN : KEPALA MI DDI 3 PURANGI

20. NAMA : NURDIN, SE.I
 UMUR : 45 TAHUN
 JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
 PEKERJAAN : KEPALA MTs DDI 3 PURANGI

21. NAMA : HERLIANI, S.Pd.
 UMUR : 32 TAHUN
 JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
 PEKERJAAN : WAKIL KEPALA MI DDI 3 PURANGI

22. NAMA : HASNI
 UMUR : 37 TAHUN
 JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
 PEKERJAAN : KETUA RT

| |
|-------------------|
| Lampiran 3 |
|-------------------|

PEDOMAN WAWANCARA

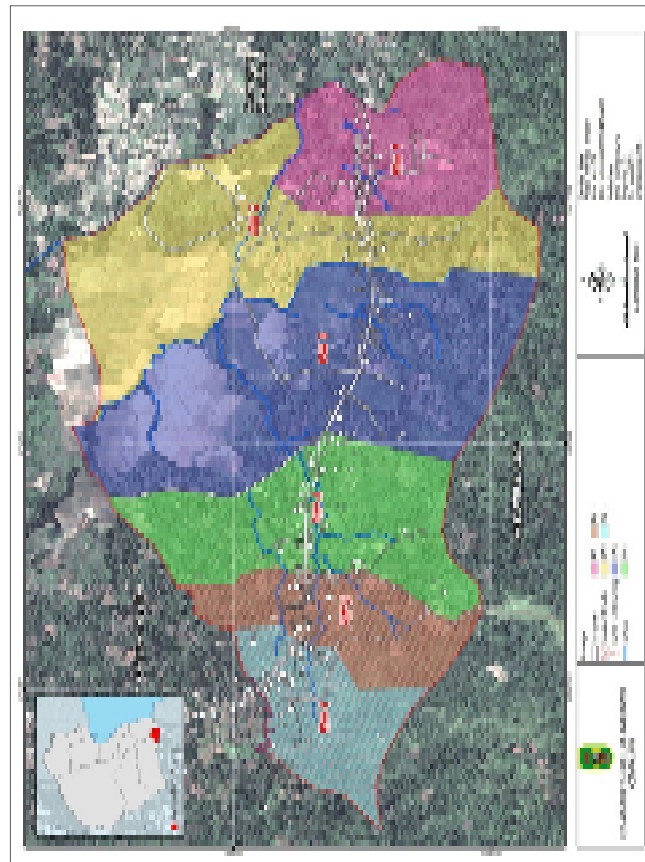
PELAKU PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

1. Apakah yang anda pahami tentang perkawinan di bawah umur ?
2. Pada umur berapakah anda memutuskan untuk menikah ?
3. Apakah yang menjadi alasan anda untuk memutuskan melakukan perkawinan di bawah umur?
4. Pada saat memutuskan menikah, apakah anda berstatus pelajar atau telah putus sekolah?
5. Apakah keputusan menikah muda ini adalah pilihan anda atau ada pengaruh atau tekanan dari luar?
6. Bagaimanakah hubungan komunikasi serta tanggung jawab pasangan anda, yang masih tergolong umur yang sangat muda?
7. Apakah ada masalah yang anda alami dalam perkawinan yang anda jalani?
8. Apakah ada Dampak yang anda rasakan dalam perkawinan anda jalani dengan umur yang masih muda?

ORANGTUA PELAKU

1. Apa yang menjadi alasan bapak/ibu untuk menikahkan anaknya?
2. Berapa umur anak bapak/ibu pada saat di nikahkan?
3. Apakah menurut bapak/ibu umur tersebut pantas untuk di nikahkan?
4. Apakah anak bapak/ibu masih sekolah?

5. Apakah keputusan untuk menikah tersebut adalah kerelaan dari anaknya sendiri?
6. Apakah setelah menikah anak bapak bapak/ibu langsung mandiri atau masih hidup serumah dan bergantung kepada bapak/ibu.?
7. Apakah pasangan tersebut memiliki ikatan kekerabatan?
8. Pada saat menikah jenjang pendidikan anak bapak/ibu sudah mencapai tahap mana?

Lampiran 3

Gambar Peta Wilayah Kelurahan Purangi

Lampiran

TESIS

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN PURANGI KOTA PALOPO

Disusun dan Diajukan oleh
ILHAM LAMAN
Nomor Pokok: 15B02110

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 11 Juli 2017

Menyetujui

Komisi penasehat,

Prof. Dr. H. Heri Tahir, SH.,MH.
Ketua

Dr. Imam Suyitno, M.Si.
Anggota

Mengetahui:

Ketua
Program Studi IPS
Pendidikan Hukum dan
Kewarganegaraan

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar

Prof. Dr. Darman Manda, M.Hum,
Nip196501031990031001

Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.
Nip 196412221991031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ilham Laman, Lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1988, di Bulantua, Jalan Opu Tohalide Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo. Anak Keenam dari Tujuh (7) bersaudara anak dari pasangan Laman dan Sanawia.

Pada tahun 1995 untuk pertama kalinya penulis memasuki dunia pendidikan di SDN No. 574 Bulantua dan tamat pada tahun 2001. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Palopo dan tamat tahun 2004, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeria (MAN) Palopo dan selanjutnya mengikuti ujian umum dan tamat tahun 2007. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan pada Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP) dan hanya dengan rentan waktu tujuh (7) semester penulis dapat menyelesaikan studi tepatnya pada 02 Maret 2013, selanjutnya pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan Pada Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Universitas Negeri Makassar (UNM).

Selama menjadi Mahasiswa di Universitas Negeri Makassar, begitu banyak ilmu dan pengalaman hidup yang penulis dapatkan, semoga bekal tersebut dapat memberikan manfaat baik kepada Penulis, maupun keluarga dan masyarakat luas.